



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



(0742) 7351069



dishub.ktl@gmail.com



www.dishub.tanjabarkab.go.id

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Illahi Rabbi, atas segenap ilmu dan karunia-Nya, akhirnya Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023, telah dapat diselesaikan.

Rencana Kerja ini disusun sebagai tindak lanjut atas amanat berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan daerah periode 11 (satu) tahun. Hal tersebut sejalan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) dan berpedoman pada Renstra-RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4).

Penyusunan Rencana Kerja ini dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan umum Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023, sehingga target penetapan RKA/DPA- OPD Tahun 2023 dipenuhi sesuai jadwal yang disepakati antara pihak Bupati Tanjung Jabung Barat dengan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Sebagai kata akhir, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada segenap jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan semua pihak terkait yang telah membantu sepenuhnya dalam penyelesaian rencana kerja ini, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan berkah, anugrah dan hidayah-Nya.

Akhirulkalimat, mudah-mudahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Kuala Tungkal, November 2023

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



SYAMSUL JUHARI, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19701223 199203 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	9
A. Faktor Penyebab Terpenuhinya program dan kegiatan	20
B. Implikasi terhadap capaian Program/kKegiatan	21
C. Kebijakan Dan Solusi	22
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	24
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	26
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023	29
2.5 Penelaahan Terhadap Usulan Program Masyarakat	39
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	40
3.2 Tujuan dan Sasaran	41
3.2 Program dan Kegiatan	41
3.3 Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023	44
BAB IV KESIMPULAN	45

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah	11
Tabel 2.2 Pengukuran Kinerja Melalui Indikator Kinerja Utama Tahun 2021	23
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Tahun 2021	25
Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023	31
Tabel 3.1 Target Dan PAD Tahun 2023	
Tabel 3.2 Tujuan Dan Sasaran yang Mengacu Pada RPJMD	
Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah adalah merupakan integral dari pembangunan nasional, sehingga perlu diselenggarakan secara seimbang dan serasi untuk menjamin keselarasan pembangunan. Untuk itu perlu disusun sebuah pedoman dan acuan dalam menetapkan kebijakan keuangan, strategi pembangunan, kebijakan umum program satuan kerja perangkat daerah yang disertai dengan rencana kerja dalam rangka regulasi dan pendanaan bersifat indikatif. Oleh karenanya, diperlukan dokumen perencanaan yang meliputi Dokumen perencanaan jangka panjang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, jangka menengah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, perencanaan pembangunan tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) OPD.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode satu tahun ke depan. Fungsi Renja OPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah. Renja OPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan berpedoman pada Renstra.

Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai salah satu OPD di Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang pelayanan transportasi kepada dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021 - 2023. Dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2023 merupakan penjabaran dari skema RPJM Daerah 2021 – 2026 dan sebagai tindak lanjut dari RKPD tahun 2023 serta Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan tahun 2021 – 2026, serta kebutuhan dana/ pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun tersebut.

Beberapa sasaran yang ingin dicapai pada sub agenda pembangunan konektivitas bidang perhubungan untuk mencapai keseimbangan pembangunan adalah :

- a. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi yang menunjang pemerataan pengembangan jaringan transportasi dari daerah terpencil ke kota dan mendorong sebagai peluang peningkatan ekonomi masyarakat dan;
- b. Meningkatnya kinerja pelayanan dan industri transportasi nasional untuk mendukung konektivitas nasional, Sistem Logistik Nasional (Sislognas) dan konektivitas global;

- c. Meningkatnya tingkat keselamatan dan keamanan penyelenggaraan pelayanan transportasi serta pertolongan dan penyelamatan korban kecelakaan transportasi.
- d. Meningkatnya tertib laik angkutan umum.

Dari sub agenda bidang perhubungan tersebut tersebut, arah kebijakan dan strategi yang terkait langsung sektor transportasi antara lain :

- a) Mempercepat pembangunan Sistem Transportasi Multimoda
- b) Mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional untuk mendukung Sistem Logistik Nasional dan penguatan konektivitas nasional dalam kerangka mendukung kerjasama regional dan global
- c) Melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan
- d) Membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Kompleks Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi
- e) Meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi serta pertolongan dan penyelamatan korban kecelakaan transportasi
- f) Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan dalam rangka mitigasi dan adaptasi perubahan iklim maupun peningkatan keselamatan dan kualitas kondisi lingkungan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengintegrasikan keberhasilan program dengan pemanfaatan anggaran (APBD) yang optimal dan mendukung keberhasilan visi misi lingkup daerah/kabupaten, lingkup provinsi hingga lingkup nasional. Sehingga memberikan efek nyata dan membantu mensejahterakan masyarakat melalui sektor perhubungan.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755)
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2000M(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 2);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2018.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rancangan awal Rencana Kerja (Renja OPD) merupakan tahapan awal dalam penyusunan Renja OPD. Renja OPD itu sendiri merupakan dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk mensinergikan program regional dan sektoral, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Adapun Tujuan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan Tahun 2022 sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- b. Sebagai acuan menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- c. Terwujudnya pencapaian visi dan misi perhubungan yang mendorong terwujudnya pencapaian visi dan misi kabupaten tanjung jabung barat;
- d. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan perhubungan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar tingkat pemerintahan;

- e. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
- f. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha;
- g. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan pengertian ringkas tentang renja OPD, proses penyusunan renja OPD, keterkaitan antara renja OPD dengan dokumen OPD, Renstra OPD, dengan Renja K/ L dan Renja Provinsi/ Kabupaten/ Kota, serta tindak lanjut dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum

Memuat tentang undang-undang, Peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, Kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian**

Renstra OPD 2016-2021

Menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) mengacu pada APBD tahun berjalan dan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Menjelaskan capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Renstra OPD atau SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dianalisis disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan tersebut.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Menjelaskan tingkat kinerja pelayanan OPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Menjelaskan hasil review terhadap rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan pada setiap OPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**BAB IV PENUTUP****Lampiran-Lampiran**

**BAB II****HASIL EVALUASI PELAKSANAAN
RENJA OPD TAHUN LALU****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD**

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau Program Program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rancangan Awal Renja (Ranwal Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2021, dilaksanakan untuk 1) mengetahui realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan,; 2) mengetahui realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 3) mengetahui realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Sehingga dengan adanya pelaksanaan evaluasi dapat diketahui :

- a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah
- c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi fahtor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan merupakan telaah terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah. Telaah

dilakukan dengan melakukan rekapitulasi terhadap hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam masa RPJM Daerah tahun 2016 – 2021 sampai dengan tahun 2021. Keseluruhan program dan kegiatan pada tahun 2021 telah terealisasi sesuai dengan target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan. Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel T-C. 29.

RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2023

Tabel TC. 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Perhubungan
Sampai Dengan Tahun 2023
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kefiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi	
						Target Renja perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Urusan Bidang Perhubungan										
	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	%	25	5	5	5	100,0%	5	15	60,00%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan	%	25	5	5	5	100,0%	5	15	60,00%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Bulan	72	12	12	12	100,0%	12	36	50,00%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	Bulan	72	12	12	12	100,0%	12	36	50,00%
	Penyedia Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyedia Jasa Administrasi Keuangan	Bulan	72	12	12	12	100,0%	12	36	50,00%

RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2023

	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Dokumen	48	8	8	8	100,0%	12	28	58,33%
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terpeliharanya prasarana transportasi	Dokumen	48	8	8	8	100,0%	12	28	58,33%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Stel	792	125	125	27	21,6%	12	164	20,71%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Disiplin Pegawai	Stel	792	125	125	27	21,6%	12	164	20,71%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Bulan	72	12	12	12	100,0%	12	36	50,00%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pelaksanaan perkantoran berjalan	Bulan	72	12	12	12	100,0%	12	36	50,00%
	Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Gedung	Peralatan gedung kantor tersedia	Bulan	72	12	12	12	100,0%	12	36	50,00%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pelayanan perkantoran berjalan	Bulan	72	12	12	12	100,0%	12	36	50,00%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pelayanan administrasi perkantoran	Bulan	72	12	12	12	100,0%	12	36	50,00%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pelayanan administrasi perkantoran	Bulan	72	12	12	12	100,0%	12	36	50,00%
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Perjalanan dinas dalam dan luar daerah terdaksana	Bulan	72	12	12	12	100,0%	12	36	50,00%

RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2023

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Bulan	72	12	12	12	100,0%	12	36	50,00%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pelaksanaan perkantoran berjalan	Bulan	72	12	12	12	100,0%	12	36	50,00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pelayanan administrasi perkantoran meningkat	Bulan	72	12	12	12	100,0%	12	36	50,00%
	Pelayanan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pelaksanaan perkantoran berjalan	Bulan	72	12	12	12	100,0%	12	36	50,00%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah		Bulan	72	12	12	12	100,0%	12	36	50,00%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Administrasi Umum Meningkat	Unit	192	32	32	32	100,0%	32	96	50,00%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan gedung kantor tersedia	Unit	324	54	54	54	100,0%	54	162	50,00%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor dalam kondisi baik	Unit	35	5	5	5	100,0%	5	15	42,86%
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		%	100%	12	12	12	100,0%	12	36	3600,00%

RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2023

	Pelaksanaan manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan		Kali	200	16	16	16	100,0%	16	48	24,00%
	Pengawasan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan	Tersedianya Dokumen Perencanaan	Kali	200	16	16	16	100,0%	16	48	24,00%
	Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota		Operasi	80	7	7	7	100,0%	7	21	26,25%
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu)		Operasi	80	7	7	7	100,0%	7	21	26,25%
	Program Pengelolaan Pelayaran		%	100%	6	6	6	100,0%	6	18	1800,00%
	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah kabupaten/Kota Yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur		Bulan	72	12	12	12	100,0%	2	26	36,11%

RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2023

Pengendalian dan pengawasan jaringan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah kabupaten/kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota dan/atau jaringan jalur kereta api kabupaten/kota dalam	Meningkatnya Ketertiban angkutan di kawasan pelabuhan laut & sungai	Bulan	72	12	12	12	100,0%	12	36	50,00%
--	---	-------	-----------	----	----	----	--------	----	----	--------

Kuala Tungkal, November 2021

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat


SYAMSUL JUHARI, S.Sos
 Pemula Utama Muda
 NIP. 19701223 199203 1 001

Pada tahun 2021 total anggaran Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat sebesar **Rp. 6.249.026.800,00** dengan rincian Belanja Langsung sebesar **Rp. 2.610.177,00** dan Belanja Tidak Langsung **Rp. 2.094.257.443,00**, dan diuraikan dalam pelaksanaan **8 Program dan 24 Kegiatan**.

Evaluasi Realisasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2019 melalui rincian program dan kegiatan (Belanja Langsung) tersebut meliputi :

1) PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Program ini dilaksanakan untuk mendukung kelancaran kegiatan perkantoran. Indikator Programnya adalah Persentase Unit Kerja Internal yang Terlayani Dengan Baik yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan kab. Tanjung Jabung Barat. Proporsi capaian program di tahun 2020 sebesar **98,3%** dengan target **100%**. Adapun alokasi anggaran untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar **Rp. 508.535.979**, dengan proporsi realisasi anggaran sebesar **Rp. 474.394.295**

2) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Program ini dilaksanakan untuk mendukung ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan kab. Tanjung Jabung Barat.. Indikator Programnya adalah Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik. Proporsi capaian program di tahun 2020 sebesar **98,8%** dengan target **100%** . Adapun alokasi anggaran untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar **Rp. 450.030.000**, dengan proporsi realisasi anggaran sebesar **Rp. 398.048.730**

3) PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Program ini dilaksanakan untuk mendukung pelayanan perkantoran yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan kab. Tanjung Jabung Barat. Indikator programnya adalah jumlah pengadaan pakaian dinas. Proporsi capaian program di tahun 2020 sebesar **0%** dengan target **100%**. Adapun alokasi anggaran untuk Program Peningkatan Disiplin Aparatur sebesar **Rp. 0**, dengan proporsi realisasi anggaran sebesar **Rp. 0**

4) PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA

Program ini dilaksanakan untuk mendukung tersedianya laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan operasional yang dilaksanakan dinas perhubungan Kab.

Tanjung Jabung Barat. Indikator programnya adalah Persentase Dokumen Perencanaan Yang tersusun tepat waktu. Proporsi capaian program di tahun 2020 sebesar **98,9%** dengan target **100%**. Adapun alokasi anggaran untuk Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja sebesar **Rp. 13.300.000**, dengan proporsi realisasi anggaran sebesar **Rp. 13.300.000**

5) **PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ**

Program ini dilaksanakan untuk mendukung terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat. Indikator Programnya adalah Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara dalam Kondisi Baik. Proporsi capaian program di tahun 2020 sebesar 20% dengan target **10 Unit**. Adapun alokasi anggaran untuk Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ sebesar **Rp. 359.000.000**, dengan proporsi realisasi anggaran sebesar **Rp. 26.700.000**

Untuk mendukung Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ diimplementasikan dengan 1 kegiatan yaitu :

- a. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal / Pelabuhan dengan alokasi dana **Rp. Rp. 359.000.000** yang dialokasikan dengan **maksud** sebagai salah satu fasilitas dan informasi untuk Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ. **Tujuan** dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk sebagai rumusan strategi peningkatan pelayanan kepada masyarakat yaitu dengan pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi dengan intensifikasi kegiatan gakum guna menurunkan tingkat kecelakaan pada sector darat dan laut. Output dari kegiatan ini adalah jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang terpelihara dengan target **10 Unit**. Realisasi target adalah **10 unit** atau **100%**. Dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 26.700.000** atau **100%**.

6) **PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN**

Program ini dilaksanakan untuk Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas dan layanan bidang perhubungan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan di bidang perhubungan darat maupun laut. Indikator programnya adalah Persentase peningkatan layanan angkutan. Proporsi capaian program di tahun 2019 sebesar dengan target **100%**. Adapun alokasi anggaran untuk Program

Peningkatan Pelayanan Angkutan sebesar **Rp. 1.390.873.000**, dengan proporsi realisasi anggaran sebesar

Untuk mendukung Program Peningkatan Pelayanan Angkutan diimplementasikan dengan 5 kegiatan, yaitu :

- a. Kegiatan Pengawasann kawasan pelabuhan laut, sungai dan penyeberangan dengan alokasi dana **Rp. 217.500.000**, yang dialokasikan dengan maksud untuk meningkatkan efektifitas pengawasan terhadap pemenuhan keselamatan pelayanan dan keselamatan penumpang di bidang perhubungan laut. **Tujuan** pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menunjang ketertiban, kelancaran, keamanan dan kenyamanan pelayaran. Output dari kegiatan ini adalah frekuensi pengawasan dan pengendalian sungai danau dan penyeberangan dengan target **16 kali**. Realisasi target adalah **16 kali** atau **100%**. Realisasi anggaran sebesar atau **100%**.
- b. Kegiatan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 191.300.000**, yang dialokasikan dengan maksud untuk melakukan konsultasi, koordinasi guna menciptakan sinergi antara dinas perhubungan dengan TNI dan Kepolisian satlantas. **Tujuan** pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Outpu dari kegiatan ini adalah melakukan rapat – rapat koordinasi mengenai rekayasa lalu lintas dan forum LLAJ dengan target **4 kali**. Realisasi target adalah **4 Kali** atau **100%**. Realisasi anggaran sebesar atau **100%**.
- c. Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamaan Penumpang dilingkungan Terminal dengan alokasi anggaran **Rp.599.880.000**, yang dialokasikan dengan maksud Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas dan layanan bidang perhubungan darat dengan mengatur jadwal operasional, menyediakan area tunggu dan fasilitas penunjang lainnya. **Tujuan** pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menciptakan kemananan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan sehingga operasional terminal terlaksana dan tertata dengan baik. Output dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen operasional yang tersusun dengan target **2 Dok**.

Realisasi target adalah **2 Dok** atau **100%**. Realisasi anggaran sebesar atau **100%**.

- d. Kegiatan Penciptaan dan Kenyamanan Penumpang dilingkungan Pelabuhan Sungai dan Pelabuhan Penyeberangan dengan alokasi anggaran **Rp. 215.355.000**, yang dialokasikan dengan Maksud Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas dan layanan bidang perhubungan darat dengan mengatur jadwal operasional, menyediakan area tunggu dan fasilitas penunjang lainnya. **Tujuan** pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan sehingga operasional pelabuhan sungai dan pelabuhan penyeberangan terlaksana dan tertata dengan baik. Output dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen operasional yang tersusun dengan target **2 Dok**. Realisasi target adalah **2 Dok** atau **100%**. Realisasi anggaran sebesar atau **100%**.
- e. Kegiatan Posko Pengamanan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah dengan alokasi dana **Rp. 166.838.000**, yang dialokasikan dengan maksud sebagai Peningkatan pengawasan dan pengendalian LLAJ serta penetapan kondisi laik jalan angkutan untuk menunjang ketertiban, kelancaran, keamanan dan kenyamanan berlalu lintas pada saat pelaksanaan hari hari besar nasional dan daerah. **Tujuan** dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk memberikan pelayanan optimal bagi pengguna transportasi sehingga terciptanya tertib lalu lintas angkutan jalan dan mengurangi angka kecelakaan di bidang perhubungan darat dan laut pada saat pelaksanaan hari hari nasional dan daerah. Output kegiatan ini adalah Jumlah pengamanan pelayanan posko ramadhan, lebaran, natal dan tahun baru serta hari besar nasional, hari besar keagamaan, hari besar daerah dan HUT perhubungan dengan target **8 Kali**. Realisasi target sebesar **8 kali** atau **100%**. Realisasi anggaran sebesar atau **100%**.

7) PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan tertib laik uji kendaraan bermotor sehingga terciptanya tertib kendaraan yang memenuhi standar laik jalan dan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Indikator programnya adalah Jumlah kendaraan yang memenuhi standar laik jalan. Adapun alokasi anggaran untuk Program

Peningkatan Kelaikan Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar **Rp. 8.800.000**. Proporsi capaian program di tahun 2019 sebesar **Rp. 8.800.000** dengan target **1.210 Unit** atau **100%**.

Untuk mendukung Program Peningkatan Kelaikan Pengujian Kendaraan Bermotor diimplementasikan melalui 1 kegiatan, yaitu :

- a. Kegiatan Uji Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor dengan alokasi dana sebesar **Rp. 8.800.000** , yang dialokasikan dengan maksud terciptanya penetapan kondisi laik jalan angkutan untuk menunjang ketertiban, kelancaran, keamanan dan kenyamanan berlalu lintas. **Tujuan** dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan tertib standar laik jalan angkutan pengguna transportasi sehingga dapat meningkatkan Retribusi di Unit Pengujian Kendaraan Bermotor dan Mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Output kegiatan ini adalah jumlah kendaraan yang memenuhi standar laik jalan dengan target **1.210 Unit**. Realisasi target sebesar **Unit** atau **100%**. Realisasi anggaran sebesar atau **100%**.

8) **PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS**

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi dengan intensifikasi kegiatan gakum dan manajemen rekayasa lalu lintas guna menurunkan tingkat kecelakaan pada sector darat dan laut. Indikator programnya adalah frekuensi pengamanan, ketertiban, kenyamanan dan keselamatan lalu lintas. Adapun alokasi anggaran untuk Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas **Rp. 666.920.000**, Proporsi capaian program di tahun 2019 sebesar **Rp. 666.920.000** dengan target **30 Kali** atau **100%**.

Untuk mendukung Program pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas diimplementasikan melalui 1 kegiatan, yaitu :

- a. Kegiatan Operasional, Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas dengan alokasi dana sebesar **Rp. 666.920.000**, yang dialokasikan dengan maksud terciptanya keamanan dan kenyamanan serta efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi dengan intensifikasi kegiatan gakum dan manajemen rekayasa lalu lintas guna menurunkan tingkat kecelakaan pada sector darat dan laut. **Tujuan**

dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk memberikan kenyamanan, keamanan, ketertiban dan keselamatan kepada pengguna transportasi melalui pengaturan lalu lintas dan raija kelengkapan standar laik jalan angkutan. Output dari kegiatan ini adalah frekuensi pengamanan, ketertiban, kenyamanan dan keselamatan lalu lintas melalui pengamanan lalu lintas angkutan jalan dengan target **30 Kali**. Realisasi target sebesar **30 Kali** atau **100%**. Realisasi anggaran sebesar **Rp. 666.920.000** atau **100%**.

a. Faktor penyebab terpenuhinya dan permasalahan tidak terpenuhinya pelaksanaan Program/kegiatan Dinas perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat tahun 2020

Faktor Faktor penyebab terpenuhinya realisasi program/kegiatan yang sesuai dengan target kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan adalah :

1. Adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja sehingga realisasi program/kegiatan dapat dicapai sesuai harapan;
2. Adanya koordinasi dan pemahaman tugas guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.
3. Adanya sumber daya aparatur, sarana, dan prasarana pendukung serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang selaras dengan pencapaian target masing-masing kegiatan.

Permasalahan dalam pelaksanaan program kegiatan tahun 2019 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, adalah sebagai berikut :

1. Adanya perubahan struktur organisasi perangkat daerah yang awalnya dinas perhubungan, informatika dan komunikasi menjadi dinas perhubungan, sehingga anggaran belanja tidak langsung (gaji pegawai) di bidang informatika dan komunikasi tidak dapat direalisasikan dan menjadi silpa, yang berpengaruh terhadap rendahnya serapan anggaran dinas perhubungan
2. Peraturan di bidang Perhubungan, baik darat dan laut memerlukan kesamaan penafsiran untuk pelaksanaannya di segala tingkatan. Selain itu juga diperlukan harmonisasi peraturan perundangan bidang Perhubungan khususnya dengan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang kadang-kadang dilapangan

menimbulkan kendala tersendiri untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah hukum di belakang hari.

3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), baik dalam jumlah maupun kualitas Sumber Daya Manusia yang terbatas jumlah tentu memerlukan manajemen tersendiri untuk dapat menjalankan roda organisasi di Bidang/UPTD dilingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. diperlukan kebutuhan komposisi di Bidang Darat dan Laut juga yang memiliki kualifikasi di bidang perhubungan mengingat dua moda tersebut terdapat pekerjaan yang memerlukan keterampilan dan pengetahuan sesuai yang ditentukan.
4. Pengalokasian Anggaran Belum Sepenuhnya Berdasarkan Pencapaian Indikator Kinerja. Kendala yang umumnya dihadapi oleh instansi adalah keterbatasan anggaran, sedangkan indikator yang harus dicapai berdasarkan RPJMD dan Renstra telah tertulis secara kuantitatif. Dengan adanya target atau angka/digit tertentu pada indikator tertentu, juga telah dapat ditentukan berapa Rupiah alokasi biaya yang diutuhkan untuk mencapainya. Namun indikator yang telah ditetapkan belum berbanding lurus dengan pengalokasian anggaran pada suatu program / kegiatan yang telah ditentukan, pada priode Rencana Tahunan yang telah disusun setiap tahunnya.
5. Pembangunan infrastruktur memerlukan biaya yang besar, hal ini juga dapat menjadi kendala. Biaya yang cukup besar yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur transportasi, memerlukan jalan keluar yang sistematis dan terukur, baik secara peraturan maupun penganggaran.

b. Implikasi yang timbul terhadap capaian program/kegiatan tahun 2021 :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
2. Terjaganya Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Terselenggaranya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Meningkatnya Keamanan, kenyamanan, ketertiban dan keselamatan pengguna jasa transportasi pada bidang darat maupun laut dengan Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi.

5. Menurunnya angka kecelakaan di bidang perhubungan darat dan laut.
6. Meningkatnya PAD pada sektor Terminal, Unit Pengujian Kendaraan Bermotor, dan Kepelabuhan
7. Meningkatnya tertib laik kendaraan angkutan umum yang memenuhi standar.

c. Kebijakan/solusi untuk mengatasi faktor-faktor tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan kapasitas penyelenggaraan pelayanan transportasi melalui peningkatan pendidikan SDM Perhubungan.
2. Menjamin adanya pemeliharaan serta tersedianya administrasi perkantoran dan sarana prasarana penunjang penyelenggaraan pemerintahan
3. Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi dengan intensifikasi kegiatan gakum dan manajemen rekayasa lalu lintas guna menurunkan tingkat kecelakaan pasda sector darat dan laut.
4. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan sarpras perhubungan yang terpadu dengan tata ruang wilayahPembinaan, pengawasan dan penertiban angkutan jalan.
5. Pemenuhan dan pemeliharaan kondisi sarana prasarana LLAJ serta penetapan kondisi laik jalan angkutan untuk menunjang ketertiban, kelancaran, keamanan dan kenyamanan berlalu lintas

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, telah ditetapkan indikator kinerja sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis 1. Menguatnya Konektivitas dari desa sampai kota dan daerah pedesaan.

Indikator 1 : Jumlah dokumen perencanaan halte sungai yang tersusun

2. Sasaran Strategis 2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor transportasi darat, sungai dan penyeberangan .

➤ Indikator 1 : Persentase peningkatan retribusi pada terminal

➤ Indikator 2 : Persentase peningkatan retribusi pada Unit Pengujian Kendaraan Bermotor

➤ Indikator 3 : Persentase peningkatan retribusi pada sektor Kepelabuhan

3. Sasaran Strategis 3. Menurunnya Tingkat Kecelakaan Transportasi Darat dan Laut

➤ Indikator 1 : Jumlah prediksi kasus kecelakaan transportasi darat

➤ Indikator 2 : Jumlah prediksi kasus kecelakaan transportasi laut

4. Sasaran Strategis 4. Meningkatnya Tertib Laik Kendaraan Angkutan Umum

➤ Indikator 1 : Persentase kendaraan yang laik jalan

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran dimaksud adalah sebagaimana tersaji dalam (table T-C.30) sebagai berikut :

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2023

TABEL T-C 30

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2021-2026

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	TARGET	TARGET RENSTRA OPD TAHUN KE -				REALISASI		PROYEKSI		CATATAN
			SPM	IKK/RPJMD	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	ANALISI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ASPEK PELAYANAN UMUM													
Fokus Layanan Urusan Wajib													
7	PERHUBUNGAN												
7,1	Jumlah dokumen halte sungai yang disusun	Dok	2	2	2	2	2	2	4	0	2	2	
7,2	Persentase peningkatan Retribusi Pada Sektor Terminal	%	100	> 0,5%	Rp 90.000.000	Rp 90.000.000	Rp 90.000.000	Rp 90.000.000	Rp 40.015.000	Rp -	Rp 100.000.000	Rp 110.000.000	
7,3	Persentase peningkatan Retribusi Pada Sektor Kepelabuhan	%	100	> 1%	Rp 204.000.000	Rp 204.000.000	Rp 204.000.000	Rp 204.000.000	Rp 159.524.600	Rp -	Rp 120.000.000	Rp 125.000.000	
7,4	Persentase Peningkatan Retribusi Pada Sektor UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	%	100	>1%	Rp 155.000.000	Rp 155.000.000	Rp 155.000.000	Rp 155.000.000	Rp -	Rp -	Rp 160.000.000	Rp 165.000.000	
7,5	Jumlah Prediksi Kasus Kecelakaan Transportasi Darat	Kasus	40	40	50	40	30	20	-	0	20	10	
7,6	Jumlah Prediksi Kasus Kecelakaan Transportasi Laut	Kasus	4	4	5	4	3	2	0	0	0	0	
7,7	Persentase Kendaraan Yang Memenuhi Standar Laik Jalan	Unit	1170	1170	2400	2500	2600	2700	2150		2200	2250	
RPJMD BIDANG URUSAN PERHUBUNGAN													
1	Perencanaan Pembangunan Halte Sungai	Dok	2	2	4	2	2	2	4	0	2	2	
	Kabupaten/Kota.												
b. Jaringan Prasarana Angkutan Jalan													

RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2023

1) Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	%	100		100	100	100	100	98	0	98	98	
Page 2												
2) Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	%	40		40	40	40	40	38	0	38	38	
c. Fasilitas Perlengkapan Jalan												
Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.	%	60		60	60	60	60	57,8	0	57,8	57,8	
d. Pelayanan pengujian Kendaraan Bermotor												
1) Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.	%	60		60	60	60	60	27,8	0	21,8	27,8	
e. Sumber Daya Manusia (SDM)												
1) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal.	%	50		50	50	50	50	10	0	10	20	

RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2023

2) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.	%	100		100	100	100	100	10	0	10	20	
3) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota.	%	40		40	40	40	40	5	0	5	5	
4) Tersedianya Sumber DayaManusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum	%	100		100	100	100	100	10	0	12	12	
1) Terpenuhi standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota.	%	100		100	100	100	100	96,7	0	98	98,1	
2. PELAYANAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU												
a. Jaringan Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau												
1) Tersedianya kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari.	%	76		76	76	76	76	50	0	70	75	

RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2023

2) Tersedianya kapal sungai dan danau yang melayani trayek dalam Kabupaten/Kota yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari.	%	40		40	40	40	40	47	0	47	48	
b. Jaringan Prasarana Angkutan Sungai dan Danau												
1) Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah dilayari angkutan sungai dan danau.	%	60		60	60	60	60	50	0	50	50	
c. Keselamatan												
2) Terpenuhi standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada lintas antar pelabuhan dalam satu Kabupaten/Kota.	%	100		100	100	100	100	98	0	98,7	98,7	
d. Sumber Daya Manusia												
3) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan sungai dan danau untuk daerah yang telah melayani angkutan sungai dan danau.	%	50		50	50	50	50	47	0	48,5	48,5	

RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2023

3. PELAYANAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN												
a. Jaringan Pelayanan Angkutan												
1) Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota.	%	60		60	60	60	60	58	0	58	58	
2) Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam kabupaten/Kota.	%	100		100	100	100	100	98	0	98	98	
b. Tersedianya Prasarana Angkutan Penyeberangan												
Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran.	%	60		60	60	60	60	50	0	50	50	
c. Keselamatan												

RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2023

1). Terpenuhi standar keselamatan kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota.	%	100		100	100	100	100	87	87	89	90	
Page 28												
d. Sumber Daya Manusia												
2). Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT atau yang beroperasi di lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota	%	50		50	50	50	50	46	0	48,5	48,5	
4. PELAYANAN ANGKUTAN LAUT												
a. Jaringan Pelayanan Angkutan Laut												
1). Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.	%	90		90	90	90	90	88	0	88	89	

RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2023

2). Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.	%	100		100	100	100	100	98	0	98	98	
b. Jaringan Pelayanan Prasarana Angkutan Laut												
Tersedianya dermaga pada setiap ibukota Kecamatan dalam Kabupaten/Kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.	%	60		60	60	60	60	65	0	65	65	
c. Keselamatan												
Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota.	%	100		100	100	100	100	97	0	97	97	

RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2023

c. Sumber Daya Manusia (SDM)												
Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan laut dengan ukuran di bawah 7 GT	%	100		100	100	100	100	97	97	97	97	

Kuala Tungkal, November 2021

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat


STAMSUL JIHARI, S.Sos
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19701223 199203 1 001

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan.

Pembangunan yang akan datang menghadapi banyak tantangan akibat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaruh globalisasi dunia yang mengakibatkan kegiatan pembangunan daerah akan semakin terkait dengan perkembangan internasional. Transportasi dan komunikasi menjadi sangat penting untuk mendukung kegiatan pembangunan daerah. Sistem dan manajemen transportasi yang baik merupakan faktor pendukung utama untuk mengembangkan kegiatan ekonomi, sosial budaya, politik, keamanan dan sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena memelihara dan meningkatkan kualitas prasarana transportasi agar tetap dalam kondisi baik serta mengembangkan sarana transportasi perdesaan dan perkotaan secara terpadu menjadi penting.

Kemajuan di bidang Komunikasi dan Informatika telah mendorong munculnya globalisasi dengan berbagai perspektifnya. Penggunaan perangkat komunikasi untuk mengakses informasi telah menjadi kebutuhan bagi seluruh lapisan masyarakat. Peran Pemerintah sebagai regulator dalam penempatan jaringan telekomunikasi agar layanan komunikasi dan informatika dapat menjangkau seluruh wilayah dengan tetap memperhatikan kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan.

- 1. Adapun tantangan urusan wajib yang ada di Dinas Perhubungan adalah:**
 - a. Mengembangkan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat sebagai sumber pendanaan pembangunan sumber daya manusia Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjab Barat;
 - b. Meningkatkan pelayanan angkutan seiring kepadatan yang disebabkan semakin meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi;
 - c. Melaksanakan pemungutan retribusi di bidang perhubungan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah;
- 2. Permasalahan, Dampak/peluang Tantangan dan Peluang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah terhadap sasaran Kabupaten. Tanjung Jabung Barat**

Urusan Perhubungan**a. STRENGTHS (KEKUATAN):**

1. Komitmen dan kompetensi sumber daya manusia di beberapa bagian/unit.
2. Sarana dan prasarana yang relatif memadai.
3. Regulasi yang mendukung.

b. WEAKNESSES (KELEMAHAN):

1. Kompetensi SDM secara keseluruhan masih perlu ditingkatkan, khususnya di bidang non teknis;
2. Anggaran yang kurang memadai;
3. Masih kurang tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka da guardrail) dan penerangan jalan Kabupaten;
4. Belum tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah antara Kecamatan dan Desa-desa ke Kabupaten.
5. Sarana dan prasarana di beberapa unit harus diperbaiki.

c. OPPORTUNITIES (PELUANG) :

1. Tersedianya angkutan umum yang melayani sebagian Wilayah Kabupaten sehingga memberi Harapan masyarakat terhadap peningkatan Pelayanan Publik Dishub;
2. Kesadaran masyarakat akan kebutuhan keselamatan dalam bertransportasi.

3. Rencana pembangunan infra struktur diwilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 4. Adanya regulasi daerah yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dishub.
 5. Semakin meningkatnya keterbukaan informasi publik melalui media massa cetak dan elektronik sehingga masyarakat/stakeholder dapat memberikan aspirasi yang positif untuk Dishub.
- d. THREATS (ANCAMAN):
1. Adanya kepentingan pihak tertentu yang tidak mendukung upaya peningkatan kualitas perhubungan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 2. Keterbatasan lahan jalan di Kabupatenn Tanjung Jabung Barat karena makin meningkatnya pemukiman (residensial) sehingga peluang memperlebar jalan untuk memperlancar transportasi menjadi sulit;
 3. Pola hidup masyarakat yang lebih suka menggunakan kendaraan pribadi dan tidak dapat dibendung penambahan unit kendaraan pribadi
- e. Adapun Isu-isu penting dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :
1. kepada masyarakat dalam jangka panjang.Mengoptimalkan peran Dinas Perhubungan sebagai instansi teknis pengendali dan pengawasan transportasi yang telah dijabarkan dalam tugas dan fungsinya.
 2. Peraturan perundangan dan pertentangan kepentingan peraturan perundangan sektoral berpengaruh besar terhadap dokumen perencanaan yang telah disusun dan berpotensi adanya ketidak konsistenan perencanaan dan mengakibatkan tidak optimalnya pelaksanaan evaluasi program/kegiatan;
 3. Integrasi perencanaan dan penganggaran, belum optimalnya implementasi integrasi perencanaan dan perencanaan berdampak pada tidak tercapainya target indikator kinerja program/kegiatan;
 4. Ketersediaan data terkini yang kurang memadai, ketersediaan data sering menjadi permasalahan dalam penyusunan perencanaan pembangunan, hal ini dikarenakan masih lemahnya manajemen data dan belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi perencanaan pembangunan;

5. Monitoring dan evaluasi yang belum optimal, belum optimalnya fungsi monitoring dan evaluasi dikarenakan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi belum terfasilitasi infrastruktur teknologi informasi yang terintegrasi antara perencanaan dan pengendalian;
6. Kapasitas aparatur perencana, kapasitas sumber daya perencana, kapasitas sumber daya perencana yang berkompeten menjadi permasalahan serius dalam peningkatan kualitas perencanaan sebagai akibat promosi jabatan dan aparatur purna tugas yang tidak diimbangi dengan kaderisasi serta adanya moratorium penerimaan pegawai baru;
7. Kurang antusiasnya masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan terutama dalam MUSRENBANG baik mulai dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten;
8. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya terkait Forum LLAJ.
9. Harapan masyarakat terhadap target kinerja pemerintah daerah sangat optimis, sehingga peran perencanaan dan evaluasi sangat vital untuk mencapai target tersebut.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Rancangan awal RKPD merupakan langkah awal ataupun dasar bagi setiap OPD dalam menyusun rancangan Renja OPD. Dalam rancangan awal RKPD tercantum program-program yang dijadikan pedoman Perencanaan Pembangunan dengan membandingkan program dari pemerintah kota dengan kebutuhan masyarakat setelah dilakukan analisis kebutuhan masyarakat sehingga akan menghasilkan program-program untuk dijadikan prioritas dalam perencanaan pembangunan kota/kabupaten.

Rancangan awal untuk RKPD Tahun 2023 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, Proporsional, efisien dan efektif. Kebijakan belanja daerah untuk 2023 sebagai berikut :

1. Prioritas pembangunan, program prioritas dan kegiatan prioritas dengan pembagian: urusan pemerintah wajib pelayanan dasar sejumlah
2. Dukungan RPJMN 2021 – 2026;

3. Penggunaan dana fungsi pendidikan ;
4. Bantuan dari Pemerintah Pusat Kementerian Perhubungan RI dan Pemerintah Provinsi Dinas Perhubungan Provinsi Jambi.
5. Pendukungan untuk optimalisasi penggunaan aset milik daerah;
6. Pendukungan implementasi amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja Dinas Perhubungan dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja OPD tersebut disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD. Pada akhirnya, Renja OPD juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati.

Hasil telaahan terhadap review rancangan awal RKPD dalam kaitannya dengan analisis kebutuhan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021 disajikan dalam Tabel T.C-31 sebagai berikut:

RENCANA KERJA

Tabel T.C 31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023
DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

RANCANGAN AWAL RKPD 2023							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							Catatan Penting
No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome)/dan Kegiatan (output)	Satuan	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome)/dan Kegiatan (output)	Satuan	Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dishub	Nilai Sakip	%	100%	Rp 6.446.479.123	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dishub	Nilai Sakip	%	100%	Rp 6.446.479.123		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dishub	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia	%	16	Rp 57.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dishub	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia	%	16	Rp 57.000.000		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dishub	Jumlah Dokumen Perncaanaan Yang Disusun	Dokumen	4	Rp 12.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dishub	Jumlah Dokumen Perncaanaan Yang Disusun	Dokumen	4	Rp 12.000.000		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dishub	Jumlah Dokumen RKA	Dokumen/Sosialisasi	1	Rp 5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dishub	Jumlah Dokumen RKA	Dokumen/Sosialisasi	1	Rp 5.000.000		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dishub	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	Dokumen	1	Rp 5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dishub	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	Dokumen	1	Rp 5.000.000		
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dishub	Jumlah Dokmen DPA	Dokumen	1	Rp 5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dishub	Jumlah Dokmen DPA	Dokumen	1	Rp 5.000.000		
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dishub	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	Dokumen	1	Rp 5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dishub	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	Dokumen	1	Rp 5.000.000		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dishub	Dokumen Laporan Kinerja	Dokumen	3	Rp 15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dishub	Dokumen Laporan Kinerja	Dokumen	3	Rp 15.000.000		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dishub	Laporan Evalasi Kinerja	Laporan	5	Rp 10.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dishub	Laporan Evalasi Kinerja	Laporan	5	Rp 10.000.000		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dishub	Jumlah Laporan Keuangan OPD	Laporan	100%	Rp 3.431.439.669	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dishub	Jumlah Laporan Keuangan OPD	Laporan	100%	Rp 3.431.439.669		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dishub	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji/Tunjangan	Bulan	12	Rp 3.268.090.669	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dishub	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji/Tunjangan	Bulan	12	Rp 3.268.090.669		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dishub	Jumlah ASN yang dibayarkan honorarium	Bulan	12	Rp 158.349.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dishub	Jumlah ASN yang dibayarkan honorarium	Bulan	12	Rp 158.349.000		

RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2023

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dishub	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan	1	Rp	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dishub	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan	1	Rp	5.000.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dishub	Jumlah Kartu Inventaris	%	100%	Rp	210.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dishub	Jumlah Kartu Inventaris	%	100%	Rp	210.000.000
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dishub	Jumlah laporan perencanaan kebutuhan barang BMD OPD	Dokumen	1	Rp	5.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dishub	Jumlah laporan perencanaan kebutuhan barang BMD OPD	Dokumen	1	Rp	5.000.000
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dishub	Jumlah barang milik daerah OPD yang di amankan	Unit	8	Rp	200.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dishub	Jumlah barang milik daerah OPD yang di amankan	Unit	8	Rp	200.000.000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dishub	Jumlah laporan BMD OPD	Dokumen	1	Rp	5.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dishub	Jumlah laporan BMD OPD	Dokumen	1	Rp	5.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dishub	Jumlah terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Orang	134	Rp	130.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dishub	Jumlah terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Orang	134	Rp	130.000.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dishub	Jumlah pakaian dinas yang tersedia	Stel	132	Rp	70.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dishub	Jumlah pakaian dinas yang tersedia	Stel	132	Rp	70.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dishub	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan	Orang	2	Rp	60.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dishub	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan	Orang	2	Rp	60.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dishub	Persentase meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100%	Rp	451.129.110	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dishub	Persentase meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100%	Rp	451.129.110
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dishub	Jumlah penyediaan penerangan kantor	Bulan	12	Rp	5.444.110	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dishub	Jumlah penyediaan penerangan kantor	Bulan	12	Rp	5.444.110
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dishub	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Unit	16	Rp	70.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dishub	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Unit	16	Rp	70.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dishub	Jumlah peralatan rumah tangga	Bulan	12	Rp	25.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dishub	Jumlah peralatan rumah tangga	Bulan	12	Rp	25.000.000

RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2023

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dishub	Jumlah bahan logistik kantor	Bulan	12	Rp 25.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dishub	Jumlah bahan logistik kantor	Bulan	12	Rp 25.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dishub	Jumlah barang cetakan (balngko atau formulir / atau xxxx) dan pengandaan	Bulan	12	Rp 19.085.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dishub	Jumlah barang cetakan (balngko atau formulir / atau xxxx) dan pengandaan	Bulan	12	Rp 19.085.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dishub	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Bulan	12	Rp 6.600.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dishub	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Bulan	12	Rp 6.600.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dishub	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	Bulan	12	Rp 300.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dishub	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	Bulan	12	Rp 300.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dishub	Jumlah barang milik daerah OPD yang tTersedia	Unit	27	Rp 925.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dishub	Jumlah barang milik daerah OPD yang tTersedia	Unit	27	Rp 925.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan roda empat / kendaraan roda dua	Unit	2	Rp 50.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan roda empat / kendaraan roda dua	Unit	2	Rp 50.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dishub	Jumlah kendaraan roda empat / kendaraan roda dua	Unit	1	Rp 600.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dishub	Jumlah kendaraan roda empat / kendaraan roda dua	Unit	1	Rp 600.000.000	
	Pengadaan Mebel		Jumlah mebel	Unit	10	Rp 50.000.000	Pengadaan Mebel		Jumlah mebel	Unit	10	Rp 50.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan / mesin atau (nama alat / mesin)	Unit	1	Rp 50.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan / mesin atau (nama alat / mesin)	Unit	1	Rp 50.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dishub	jumlah sarana / prasarana gedung kantor / (nama sarana / prasarana)	Unit	10	Rp 100.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dishub	jumlah sarana / prasarana gedung kantor / (nama sarana / prasarana)	Unit	10	Rp 100.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dishub	jumlah sarana / prasarana pendukung gedung kantor / (nama sarana / prasarana)	Unit	3	Rp 75.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dishub	jumlah sarana / prasarana pendukung gedung kantor / (nama sarana / prasarana)	Unit	3	Rp 75.000.000	

RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2023

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dishub	Persentase jas Penunjang Urusan Yang Tersedia	Bulan	12	Rp 125.238.104	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dishub	Persentase jas Penunjang Urusan Yang Tersedia	Bulan	12	Rp 125.238.104	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dishub	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang dikelola	Bulan	12	Rp 1.428.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dishub	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang dikelola	Bulan	12	Rp 1.428.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dishub	Jumlah hitungan beban telepon / air / listrik yang terpakai, atau jumlah hitungan rupiah yang dibayarkan	Bulan	12	Rp 103.200.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dishub	Jumlah hitungan beban telepon / air / listrik yang terpakai, atau jumlah hitungan rupiah yang dibayarkan	Bulan	12	Rp 103.200.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dishub	Jumlah jasa layanan umum kantor	Bulan	12	Rp 20.610.104	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dishub	Jumlah jasa layanan umum kantor	Bulan	12	Rp 20.610.104	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dishub	Jumlah bangunan/kendaraan Kantor Kondisi Baik	Unit	95	Rp 1.116.672.240	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dishub	Jumlah bangunan/kendaraan Kantor Kondisi Baik	Unit	95	Rp 1.116.672.240	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dishub	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Unit	2	Rp 200.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dishub	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Unit	2	Rp 200.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dishub	Jumlah kendaraan dinas operasional	Unit	32	Rp 531.300.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dishub	Jumlah kendaraan dinas operasional	Unit	32	Rp 531.300.000	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Rp -	Jumlah aset tetap lainnya / (xxxx)	Unit	54	Rp 30.372.240	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Rp -	Jumlah aset tetap lainnya / (xxxx)	Unit	54	Rp 30.372.240	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dishub	Jumlah sarana / prasarana gedung kantor	Unit	7	Rp 355.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dishub	Jumlah sarana / prasarana gedung kantor	Unit	7	Rp 355.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Tingkat Tertib Lalu Lintas Angkutan Jalan	%	100%	Rp 2.825.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Tingkat Tertib Lalu Lintas Angkutan Jalan	%	100%	Rp 2.825.000.000	

RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2023

Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dishub	Jumlah Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota yang tersedia	Dokumen	1	Rp 500.000.000	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dishub	Jumlah Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota yang tersedia	Dokumen	1	Rp 500.000.000	
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dishub	Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten	Dokumen	1	Rp 500.000.000	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dishub	Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten	Dokumen	1	Rp 500.000.000	
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dishub	Dokumen yang dilegalisasi/Jumlah sosialisasi	Dokumen/Sosialisasi	0	Rp -	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dishub	Dokumen yang dilegalisasi/Jumlah sosialisasi	Dokumen/Sosialisasi	0	Rp -	
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dishub	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Yang Tersedia	Unit	55	Rp 185.000.000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dishub	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Yang Tersedia	Unit	55	Rp 185.000.000	
Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dishub	Jumlah Prasarana Jalan Yang Terpenuhi	Unit	35	Rp 150.000.000	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dishub	Jumlah Prasarana Jalan Yang Terpenuhi	Unit	35	Rp 150.000.000	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Dishub	Jumlah Prasarana Jalan dalam kondisi baik	Unit	20	Rp 35.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Dishub	Jumlah Prasarana Jalan dalam kondisi baik	Unit	20	Rp 35.000.000	
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Dishub	Persentase Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	%	100%	Rp 50.000.000	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Dishub	Persentase Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	%	100%	Rp 50.000.000	
Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Dishub	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Tersusun	Dokumen	1	Rp 50.000.000	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Dishub	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Tersusun	Dokumen	1	Rp 50.000.000	
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Dishub	Jumlah Petugas Aparatur yang mengikuti diklat struktural	Orang	0	Rp -	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Dishub	Jumlah Petugas Aparatur yang mengikuti diklat struktural	Orang	0	Rp -	
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Dishub	Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Yang Tersedia	Dokumen	1	Rp 10.000.000	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Dishub	Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Yang Tersedia	Dokumen	1	Rp 10.000.000	

RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2023

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Dishub	Jumlah Dokumen Rekomendasi	Dokumen	1	Rp 10.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Dishub	Jumlah Dokumen Rekomendasi	Dokumen	1	Rp 10.000.000	
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dishub	Peersentase Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	100%	Rp 1.020.000.000	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dishub	Peersentase Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	100%	Rp 1.020.000.000	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dishub	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia	Unit	1	Rp 750.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dishub	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia	Unit	1	Rp 750.000.000	
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dishub	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat struktural	Orang	2	Rp 40.000.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dishub	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat struktural	Orang	2	Rp 40.000.000	
Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Dishub	Jumlah kendaraan yang wajib uji	Unit	1000	Rp 10.000.000	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Dishub	Jumlah kendaraan yang wajib uji	Unit	1000	Rp 10.000.000	
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dishub	Jumlah Kendaraan yang memenuhi standar laik jalan	Unit	1000	Rp 75.000.000	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dishub	Jumlah Kendaraan yang memenuhi standar laik jalan	Unit	1000	Rp 75.000.000	
Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dishub	Jumlah sosialisasi	Sosialisasi	2	Rp 20.000.000	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dishub	Jumlah sosialisasi	Sosialisasi	2	Rp 20.000.000	
Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Dishub	Jumlah Dokumen Analisis Potensi Kendaraan Yang Wajib Uji	Dokumen	1	Rp 25.000.000	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Dishub	Jumlah Dokumen Analisis Potensi Kendaraan Yang Wajib Uji	Dokumen	1	Rp 25.000.000	
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dishub	Jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Unit	8	Rp 100.000.000	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dishub	Jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Unit	8	Rp 100.000.000	
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dishub	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan	%	100%	Rp 795.000.000	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dishub	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan	%	100%	Rp 795.000.000	
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dishub	Jumlah laporan rekayasa lalu lintas	Laporan	1	Rp 15.000.000	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dishub	Jumlah laporan rekayasa lalu lintas	Laporan	1	Rp 15.000.000	

RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2023

Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Dishub	Jumlah Operasi Pengawasan dan Pengendalian	Kali	36	Rp 750.000.000	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Dishub	Jumlah Operasi Pengawasan dan Pengendalian	Kali	36	Rp 750.000.000	
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Dishub	Jumlah Rapat Rapat Pembahasan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Kali	3	Rp 30.000.000	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Dishub	Jumlah Rapat Rapat Pembahasan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Kali	3	Rp 30.000.000	
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Dishub	Persentase Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	%	100%	Rp 15.000.000	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Dishub	Persentase Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	%	100%	Rp 15.000.000	
Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Dishub	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat struktural	Orang	1	Rp 15.000.000	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Dishub	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat struktural	Orang	1	Rp 15.000.000	
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Dishub	Jumlah Terlaksananya Razia/operasi	Razia/operasi gabungan	2	Rp 50.000.000	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Dishub	Jumlah Terlaksananya Razia/operasi	Razia/operasi gabungan	2	Rp 50.000.000	
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Dishub	Jumlah Terlaksananya Razia/operasi Gabungan	Razia/operasi gabungan	2	Rp 50.000.000	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Dishub	Jumlah Terlaksananya Razia/operasi Gabungan	Razia/operasi gabungan	2	Rp 50.000.000	
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dishub	Persentase Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	100%	Rp 175.000.000	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dishub	Persentase Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	100%	Rp 175.000.000	
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Dishub	Jumlah Operasi Pengendalian Angkutan Umum	Operasi	5	Rp 175.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Dishub	Jumlah Operasi Pengendalian Angkutan Umum	Operasi	5	Rp 175.000.000	

RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2023

	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dishub	Persentase Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	100%	Rp	-	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dishub	Persentase Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	100%	Rp	-
	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	Dishub	Jumlah Dokumen Trayek Angkutan	Dokumen	0	Rp	-	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	Dishub	Jumlah Dokumen Trayek Angkutan	Dokumen	0	Rp	-
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dishub	Persentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	100%	Rp	15.000.000	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dishub	Persentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	100%	Rp	15.000.000
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dishub	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan	Dokumen	1	Rp	15.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dishub	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan	Dokumen	1	Rp	15.000.000
	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp	Jumlah Dokumen	Dokumen	1	Rp	10.000.000	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp	Jumlah Dokumen	Dokumen	1	Rp	10.000.000
	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dishub	Jumlah Dokumen Penetapan Tarif	Dokumen	1	Rp	10.000.000	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dishub	Jumlah Dokumen Penetapan Tarif	Dokumen	1	Rp	10.000.000

RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2023

	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Dishub	Tingkat Pemenuhan Pengelolaan Pelayaran	%	100%	Rp 6.617.500.000	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Dishub	Tingkat Pemenuhan Pengelolaan Pelayaran	%	100%	Rp 6.617.500.000	
	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Dishub	Persentase Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	%	100%	Rp 15.000.000	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Dishub	Persentase Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	%	100%	Rp 15.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Dishub	Jumlah Laporan	Laporan	1	Rp 15.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Dishub	Jumlah Laporan	Laporan	1	Rp 15.000.000	
	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	Dishub	Persentase Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	%	100%	Rp 15.000.000	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	Dishub	Persentase Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	%	100%	Rp 15.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	Dishub	Jumlah Laporan	Laporan	1	Rp 15.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	Dishub	Jumlah Laporan	Laporan	1	Rp 15.000.000	

RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2023

Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Dishub	Persentase Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	%	100%	Rp 860.000.000	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Dishub	Persentase Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	%	100%	Rp 860.000.000	
Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dishub	Jumlah dokumen	Dokumen	1	Rp 10.000.000	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dishub	Jumlah dokumen	Dokumen	1	Rp 10.000.000	
Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dishub	Jumlah operasi/penertiban	Operasional	12	Rp 850.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dishub	Jumlah operasi/penertiban	Operasional	12	Rp 850.000.000	

RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2023

	Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dishub	Persentase Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	%	100%	Rp	22.500.000	Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dishub	Persentase Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	%	100%	Rp	22.500.000	
	Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dishub	Jumlah Dokumen Tarif Pelabuhan Penyeberangan	Dokumen	1	Rp	12.500.000	Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dishub	Jumlah Dokumen Tarif Pelabuhan Penyeberangan	Dokumen	1	Rp	12.500.000	
	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	Dishub	jumlah operasi pelabuhan	Operasional	3	Rp	10.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	Dishub	jumlah operasi pelabuhan	Operasional	3	Rp	10.000.000	
	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Dishub	Persentase Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	%	100%	Rp	300.000.000	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Dishub	Persentase Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	%	100%	Rp	300.000.000	
	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Dishub	Kajian Perencanaan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Dokumen	1	Rp	300.000.000	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Dishub	Kajian Perencanaan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Dokumen	1	Rp	300.000.000	

RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2023

	Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Dishub	Persentase Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	%	100%	Rp 185.000.000	Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Dishub	Persentase Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	%	100%	Rp 185.000.000	
	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Dishub	Dokumen rencana induk DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau Serta Dokumen Perencanaan Pembangunan Halte Sungai	Dokumen	3	Rp 150.000.000	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Dishub	Dokumen rencana induk DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau Serta Dokumen Perencanaan Pembangunan Halte Sungai	Dokumen	3	Rp 150.000.000	
	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Dishub	Legalisasi dokumen/sosialisasi	Dokumen	2	Rp 25.000.000	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Dishub	Legalisasi dokumen/sosialisasi	Dokumen	2	Rp 25.000.000	
	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Dishub	Jumlah laporan	Laporan	1	Rp 10.000.000	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Dishub	Jumlah laporan	Laporan	1	Rp 10.000.000	
	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Dishub	Persentase Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	%	100%	Rp 5.160.000.000	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Dishub	Persentase Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	%	100%	Rp 5.160.000.000	
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Dishub	Jumlah Rekomendasi Yang di Keluarkan	Dokumen	0	Rp -	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Dishub	Jumlah Rekomendasi Yang di Keluarkan	Dokumen	0	Rp -	
	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Dishub	Jumlah Pelabuhan/Halte	Unit	2	Rp 5.000.000.000	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Dishub	Jumlah Pelabuhan/Halte	Unit	2	Rp 5.000.000.000	

RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2023

Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Dishub	Jumlah Pelabuhan sungai dan danau dalam kondisi baik	Unit	3	Rp 150.000.000	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Dishub	Jumlah Pelabuhan sungai dan danau dalam kondisi baik	Unit	3	Rp 150.000.000	
Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Dishub	Jumlah dokumen operasional	Dokumen	1	Rp 10.000.000	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Dishub	Jumlah dokumen operasional	Dokumen	1	Rp 10.000.000	
Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal	Dishub	Persentase Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal	%	1	Rp 15.000.000	Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal	Dishub	Persentase Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal	%	1	Rp 15.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal	Dishub	Jumlah laporan	Laporan	1	Rp 15.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal	Dishub	Jumlah laporan	Laporan	1	Rp 15.000.000	
Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Dishub	Persentase Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	%	1	Rp 15.000.000	Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Dishub	Persentase Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	%	1	Rp 15.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Dishub	Jumlah laporan	Laporan	1	Rp 15.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Dishub	Jumlah laporan	Laporan	1	Rp 15.000.000	
Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Dishub	Persentase Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	%	1	Rp 15.000.000	Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Dishub	Persentase Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	%	1	Rp 15.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Dishub	Jumlah Laporan	Laporan	1	Rp 15.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Dishub	Jumlah Laporan	Laporan	1	Rp 15.000.000	

RENCANA KERJA

Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Dishub	Persentase Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	%	1	Rp 15.000.000	Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Dishub	Persentase Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	%	1	Rp 15.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Dishub	Jumlah Laporan	Laporan	1	Rp 15.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Dishub	Jumlah Laporan	Laporan	1	Rp 15.000.000	
					Rp 15.888.979.123						Rp 15.888.979.123	

Kuala Tungkal, November 2021

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



SYAMSUL JUHARI, S.Sos
Pemuda Utama Muda
NIP. 19701223 199203 1 001

2.5. Penelaahan Usulan Program Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan propinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Propinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah propinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah.

Dinas Perhubungan sebagai Perangkat Daerah dengan tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan di bidang perhubungan dimana peran masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu Dinas Perhubungan dalam hal ini mengkoordinasikan program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan yang nantinya ditujukan langsung kepada Perangkat Daerah terkait.

Tabel T-C 32

**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2023
KAUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

Nama OPD : Dinas Perhubungan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENGELOLAAN PLAYARAN				
Kegiatan	Kegiatan Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	-	Persentase Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	%	-
Sub Kegiatan	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Desa Lumahan RT. 02 Kecamatan Senyerang	Dokumen rencana induk DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau Serta Dokumen Perencanaan Pembangunan Halte Sungai	1 Dokumen	Pembangunan Halte Sungai/Dermaga Sungai Desa Lumahan RT. 02 Kecamatan Senyerang
		Desa Pelabuhan dagang		1 Dokumen	Pembangunan Dermaga TBS di Daerah Teluk

2.6. Penelaahan Terhadap Usulan Musrenbang Usulan Pokir DPRD

Penyempurnaan Rancangan Awal Renja menjadi Rancangan Renja OPD pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembanunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembanunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 131 ayat (1) "Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (16) ayat (2) huruf c merupakan proses penyempurnaan rancangan awal renja perangkat daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 130.

Proses pelaksanaan Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Opd melalui Rapat Forum Perangkat Daerah dalam Rangka RKPD Tahun 2023 yang dilaksanakan pada Hari Selasa, Tanggal 15 Bulan Februari Tahun 2022 di Ruang Rapat pelabuhan LLASDP Kuala Tungkal Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, menyepakati hal – hal sebagai berikut :

MENYEPAKATI

- KESATU** : Menyepakati program dan kegiatan prioritas, dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari musrenbang kecamatan dan pokir DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- KEDUA** : Menyepakati daftar usulan Musrenbang Kecamatan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini
- KETIGA** : Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya (LAMPIRAN I,II & III), merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan forum OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini.
- KEEMPAT** : Rancangan Awal Renja Dinas Perhubungan Tahun 2023 telah disesuaikan dengan Kepmendari 50 Tahun 2021, yang memuat 3 Program,, 30 Kegiatan dan 72 Sub kegiatan .
- KELIMA** : Relevansi Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2023 dengan Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat termuat dalam poin 1 (kesatu) yaitu “ Membangun jalan dan jembatan penghubung antar desa, kecamatan, kabupaten, dan perbatasan”.
- KEENAM** : Dalam Rancangan Awal Renja Tahun 2023 telah termuat 24 Usulan Pokir DPRD dan 11 Usulan dari Musrenbang serta direkap melalui aplikasi SIPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- KETUJUHU** : Untuk 24 usulan Pokir DPRD akan ditelaah dan disesuaikan dengan Pagu Anggaran Dinas Perhubungan Tahun 2023.

RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2023

- KEDELAPAN : Rehab Halte sungai Penyebrangan ke Kecamatan Sebrang Kota di RT 001 Desa Tanjung Senjulung, Kab. Tanjung Jabung Barat, Kec. Bram Itam membutuhkan 4 tiang pancang.
- KESEMBILAN : Pembangunan halte sungai di RT 05 Dsn Tanjung Baru Desa Sungai Jering, Kab. Tanjung Jabung Barat, akan diusulkan dalam APBDP Tahun 2022 atau APBD Provinsi Jambi Tahun 2023.
- KESEPULUH : Pembangunan Dermaga Bongkar Muat Barang di RT.08 Dusun Utama , Desa Pasar Senin, Kecamatan Pengabuan, Kab. Tanjung Jabung Barat akan diusulkan ke Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- KESEBELAS : Usulan dari Lurah Kuala Betara akan disesuaikan dengan kebutuhan anggaran Dinas Perhubungan Tahun 2023.
- KEDUABELAS : Pembangunan Halte Sungai di RT 04 Desa Sungai rambai Panjang 3 x 40 M, Kab. Tanjung Jabung Barat akan diusulkan melalui APBD Provinsi Jambi Tahun 2023 dan Perlu menyampaikan proposal pengajuan .
- KETIGABELAS : Rehab Berat Pemeliharaan halte sungai diprioritaskan pada APBDP Dinas Perhubungan Tahun 2022 di RT. 04 Margo Rukun,Kec. Senyerang, Kab. Tanjung Jabung Barat.
- KEEMPATBELAS : Rehab Berat Pemeliharaan halte sungai diprioritaskan pada APBDP Dinas Perhubungan Tahun 2023 di RT.01 Parit Pasirah Desa Sungai Kepayang, Kab. Tanjung Jabung Barat, Kec. Senyerang, Desa Sungai kepayang
- KELIMABELAS : Perencanaan Halte Sungai Parit 8 RT. 04, Kab. Tanjung Jabung Barat, Kec. Senyerang, Desa Sungailandak dianggarkan Pada tahun 2023.
- KEENAMBELAS : Perencanaan Pembangunan Halte Sungai di RT. 05, Kab. Tanjung Jabung Barat, Kec. Senyerang, Kelurahan Senyerang dianggarkan pada Tahun 2023.
- KETUJUHBELAS : Penyesuaian dan Pemutakhiran Kodifikasi Program/Kegiatan/Subkegiatan Kepmen 50-5889 Dinas Perhubungan menambah **2 SubKegiatan** beserta Pagu anggarannya. Yaitu pada :
- Kegiatan : Pembangunan dan Penertiban Izin Pembangunann dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**
- Penambahan 2 Sub Kegiatan Yaitu :
- Subkegiatan :**
1. **Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau (Pagu anggaran Terlampir dalam Matriks T.c 27 Perubahan)**
 2. **Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau (Pagu anggaran Terlampir dalam Matriks T.c 27 Perubahan)**
- KEDELAPANBELAS : Jumlah Usulan Pokir DPRD berjumlah **42 Usulan** dan Usulan Musrenbang **11 Usulan**, jadi total usulan yang masuk dalam urusan perhubungan berjumlah **53 Usulan** tahun 2022.

LAMPIRAN USULAN POKIR DPRD DAN MUSRENBANG TAHUN 2023 :

Daftar Usulan Pokir DPRD Yang Masuk Kedalam Urusan Perhubungan Tahun 2022

No	Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Koefisien	OPD Tujuan Awal	OPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Setwan	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status
1	16-01-2022	DEDI HADI, SH	GOLKAR	Perhubungan	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	dalam rangka memperlancar arus transportasi utk mengangkut barang dan orang melalui aliran sungai betara dibutuhkan perahu penyebrangan yang representatif	KUB Serengkuh Dayung desa kuala indah (Ukuran P 9M lebar 185Cm tinggi 55Cm, Kab. Tanjung Jabung Barat	Kuala Betara	Kuala Indah	2 unit	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	Rekomendasi : diteruskan ke proses selanjutnya Koefisien : 2 unit Anggaran : 0	Rekomendasi : dapat diteruskan Koefisien : 2 unit Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : (Diterima) Pengadaan 2 Unit Perahu Untuk Operasional Penyebrangan diprioritaskan pada APBDP Dinas Perhubungan Tahun 2022 Koefisien : 2 unit Anggaran : 50000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
2	16-01-2022	DEDI HADI, SH	GOLKAR	Perhubungan	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	dalam rangka memperlancar arus transportasi utk mengangkut barang dan orang melalui aliran sungai betara dibutuhkan perahu penyebrangan yang representatif	KUB SERENTAK KETUJUAN DESA SUNGAI GEBAR (Ukuran p 9 M Lebar 185 Cm tinggi 55 Cm, Kab. Tanjung Jabung Barat	Kuala Betara	Sungaigebar	2 unit	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	Rekomendasi : diteruskan ke proses selanjutnya Koefisien : 2 unit Anggaran : 0	Rekomendasi : dapat diteruskan Koefisien : 2 unit Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : (Diterima) Pengadaan 2 Unit Perahu Untuk Operasional Penyebrangan diprioritaskan pada APBDP Dinas Perhubungan Tahun 2022 Koefisien : 2 unit Anggaran : 50000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
3	16-01-2022	SYUFRAYOGI SYAIFUL, S.IP	GOLKAR	Perhubungan	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	belum adanya halte sungai yang layak	pembangunan dermaga tambatan perahu parit sapat, Kab. Tanjung Jabung Barat	Seberang Kota	Kuala Baru	1 kegiatan	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	Rekomendasi : diteruskan ke proses selanjutnya Koefisien : 1 Dok Anggaran : 0	Rekomendasi : dapat diteruskan Koefisien : 1 Dok Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : (Diterima) Perencanaan Dokumen Pembangunan Halte Sungai Akan Disesuaikan Dengan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2023 Koefisien : 1 Dok Anggaran : 50000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
4	17-01-2022	JAMAL DARMAWAN SIE, SE. MM	TANJUNG JABUNG BARAT BERSATU	Perhubungan	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	diperlukan Pembangunan Dermaga Apung	Dusun Rawai Jaya, Kab. Tanjung Jabung Barat	Seberang Kota	Kuala Baru	1 Kegiatan	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	Rekomendasi : diteruskan ke proses selanjutnya Koefisien : 1 Dok Anggaran : 0	Rekomendasi : dapat diteruskan Koefisien : 1 Dok Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : (Diterima) Perencanaan Dokumen Pembangunan Halte Sungai Akan Disesuaikan Dengan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2023 Koefisien : 1 Dok Anggaran : 50000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
5	17-01-2022	SYUFRAYOGI SYAIFUL, S.IP	GOLKAR	Perhubungan	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	terhambatnya aktivitas bongkar muat hasil produksi perkebunan	dermaga bongkar muat delapan rt lokasi rt 2 parit selong, Kab. Tanjung Jabung Barat	Seberang Kota	Muaraseberang	1 kegiatan	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	Rekomendasi : diteruskan ke proses selanjutnya Koefisien : 1 Dok Anggaran : 0	Rekomendasi : dapat diteruskan Koefisien : 1 Dok Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : (Diterima) Perencanaan Dokumen Pembangunan Halte Sungai Akan Disesuaikan Dengan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2023 Koefisien : 1 Dok Anggaran : 50000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
6	18-01-2022	JAMAL DARMAWAN SIE, SE. MM	TANJUNG JABUNG BARAT BERSATU	Perhubungan	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	Perlunya Pembangunan Dermaga Apung/ Halte Sungai 2 x 45 M guna Menunjang Konektifitas dan Aktifitas daripada Masyarakat sehingga diperlukan Pembangunan Dermaga Apung	RT. 001, Kab. Tanjung Jabung Barat	Seberang Kota	Kuala Kahar	1 Kegiatan	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	Rekomendasi : diteruskan ke proses selanjutnya Koefisien : 1 Dok Anggaran : 0	Rekomendasi : dapat diteruskan Koefisien : 1 Dok Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : (Diterima) Perencanaan Dokumen Pembangunan Halte Sungai Akan Disesuaikan Dengan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2023 Koefisien : 1 Dok Anggaran : 50000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
7	18-01-2022	JAMAL DARMAWAN SIE, SE. MM	TANJUNG JABUNG BARAT BERSATU	Perhubungan	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	Pembangunan Dermaga tambatan perahu/halte sungai 2 x 55 Meter	RT 06 Dusun Pidada, Kab. Tanjung Jabung Barat	Seberang Kota	Tungkal IV Desa	1 Kegiatan	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	Rekomendasi : diteruskan ke proses selanjutnya Koefisien : 1 Dok Anggaran : 0	Rekomendasi : dapat diteruskan Koefisien : 1 Dok Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : (Diterima) Perencanaan Dokumen Pembangunan Halte Sungai Akan Disesuaikan Dengan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2023 Koefisien : 1 Dok Anggaran : 50000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
8	18-01-2022	SYUFRAYOGI SYAIFUL, S.IP	GOLKAR	Perhubungan	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	Mempermudah akses Penyebrangan	pemohon pelabuhan apung untuk naik turun kendaraan di parit sapat, Kab. Tanjung Jabung Barat	Seberang Kota	Muaraseberang	30 tiang	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	Rekomendasi : diteruskan ke proses selanjutnya Koefisien : 30 tiang Anggaran : 0	Rekomendasi : dapat diteruskan Koefisien : 30 tiang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : (Diterima) Rehab Halte Sungai Akan Disesuaikan Dengan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2023 Koefisien : 30 tiang Anggaran : 300000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
9	18-01-2022	H. ASSEK	GERINDRA	Perhubungan	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	dermaga/halte sungai yang rusak berat	rt 04 parit 8, Kab. Tanjung Jabung Barat	Senyerang	Sungailanda	1 unit	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	Rekomendasi : diteruskan ke proses selanjutnya Koefisien : 1 Dok Anggaran : 0	Rekomendasi : dapat diteruskan Koefisien : 1 Dok Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : (Diterima) Perencanaan Dokumen Pembangunan Halte Sungai Akan Disesuaikan Dengan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2023 Koefisien : 1 Dok Anggaran : 50000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

10	19-01-2022	MUHAMMAD ZAKI, ST	PKB	Perhubungan	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	PEMBANGUNAN HALTE SUNGAI	DESA MUARA SEBERANG KECAMATAN SEBERANG KOTA, Kab. Tanjung Jabung Barat	Seberang Kota	Muaraseberang	1 Unit	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	Rekomendasi : diteruskan ke proses selanjutnya Koefisien : 1 Dok Anggaran : 0	Rekomendasi : dapat diteruskan Koefisien : 1 Dok Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : (Diterima) Perencanaan Dokumen Pembangunan Halte Sungai Akan Disesuaikan Dengan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2023 dan Diusulkan melalui APBD Provinsi Koefisien : 1 Dok Anggaran : 50000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
11	19-01-2022	MUHAMMAD ZAKI, ST	PKB	Perhubungan	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	PEMBANGUNAN HALTE SUNGAI	DESA SUNGAI LANDAK KECAMATAN PENGABUAN, Kab. Tanjung Jabung Barat	Senyerang	Sungailanda	1 Unit	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	Rekomendasi : diteruskan ke proses selanjutnya Koefisien : 1 Dok Anggaran : 0	Rekomendasi : dapat diteruskan Koefisien : 1 Dok Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : (Diterima) Perencanaan Dokumen Pembangunan Halte Sungai Akan Disesuaikan Dengan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2023 dan Diusulkan melalui APBD Provinsi Koefisien : 1 Dok Anggaran : 50000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
12	19-01-2022	MUHAMMAD ZAKI, ST	PKB	Perhubungan	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	PEMBANGUNAN HALTE SUNGAI	RT.09 DESA LUMAHAN KECAMATAN SENYERANG, Kab. Tanjung Jabung Barat	Senyerang	Lumahan	1 Unit	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	Rekomendasi : diteruskan ke proses selanjutnya Koefisien : 1 Dok Anggaran : 0	Rekomendasi : dapat diteruskan Koefisien : 1 Dok Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : (Diterima) Perencanaan Dokumen Pembangunan Halte Sungai Akan Disesuaikan Dengan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2023 dan Diusulkan melalui APBD Provinsi Koefisien : 1 Dok Anggaran : 50000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
13	19-01-2022	MUHAMMAD ZAKI, ST	PKB	Perhubungan	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	PEMBANGUNAN HALTE SUNGAI	DESA SUNGAI RAMBAI KECAMATAN SENYERANG, Kab. Tanjung Jabung Barat	Senyerang	Sungairambi	1 Unit	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	Rekomendasi : diteruskan ke proses selanjutnya Koefisien : 1 Dok Anggaran : 0	Rekomendasi : dapat diteruskan Koefisien : 1 Dok Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : (Diterima) Perencanaan Dokumen Pembangunan Halte Sungai Akan Disesuaikan Dengan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2023 dan Diusulkan melalui APBD Provinsi Koefisien : 1 Dok Anggaran : 50000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
14	19-01-2022	H. ABDURRAHMAN	TANJUNG JABUNG BARAT BERSATU	Perhubungan	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	MEMOHON HALTE AIR DI RT. 01	DESA KUALA KAHAR KEC. SEBERANG KOTA, Kab. Tanjung Jabung Barat	Seberang Kota	Seluruh Kelurahan/Desa	1 kegiatan	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	Rekomendasi : diteruskan ke proses selanjutnya Koefisien : 1 Dok Anggaran : 0	Rekomendasi : dapat diteruskan Koefisien : 1 Dok Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : (Diterima) Perencanaan Dokumen Pembangunan Halte Sungai Akan Disesuaikan Dengan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2023 dan Diusulkan melalui APBD Provinsi Koefisien : 1 Dok Anggaran : 50000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
15	19-01-2022	H. ABDURRAHMAN	TANJUNG JABUNG BARAT BERSATU	Perhubungan	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	MEMOHON HALTE AIR DI RT. 01	DESA KUALA KAHAR KEC. SEBERANG KOTA, Kab. Tanjung Jabung Barat	Seberang Kota	Kuala Kahar	1 kegiatan	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	Rekomendasi : diteruskan ke proses selanjutnya Koefisien : 1 Dok Anggaran : 0	Rekomendasi : dapat diteruskan Koefisien : 1 Dok Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : (Diterima) Perencanaan Dokumen Pembangunan Halte Sungai Akan Disesuaikan Dengan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2023 dan Diusulkan melalui APBD Provinsi Koefisien : 1 Dok Anggaran : 50000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
16	20-01-2022	Hj. CICI HALIMAH, SE	PDI P	Perhubungan	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	PEMBANGUNAN HALTE SUNGAI	DESA SEMAU KECAMATAN BRAM ITAM, Kab. Tanjung Jabung Barat	Bram Itam	Semau	1 Kegiatan	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	Rekomendasi : diteruskan ke proses selanjutnya Koefisien : 1 Dok Anggaran : 0	Rekomendasi : dapat diteruskan Koefisien : 1 Dok Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : (Diterima) Perencanaan Dokumen Pembangunan Halte Sungai Akan Disesuaikan Dengan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2023 Koefisien : 1 Dok Anggaran : 50000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
17	20-01-2022	JAMAL DARMAWAN SIE, SE. MM	TANJUNG JABUNG BARAT BERSATU	Perhubungan	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	Pelabuhan Tambatan Perahu	RT.04, Kab. Tanjung Jabung Barat	Tungkal Ilir	Teluksialang	15 Meter Persegi	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	Rekomendasi : diteruskan ke proses selanjutnya Koefisien : 15 Dok Anggaran : 0	Rekomendasi : dapat diteruskan Koefisien : 15 Dok Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : (Diterima) Perencanaan Dokumen Pembangunan Halte Sungai Akan Disesuaikan Dengan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2023 Koefisien : 1 Dok Anggaran : 50000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

18	21-01-2022	H. MUH. SJAFRIL SIMAMORA, S.H.	PAN	Perhubungan	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	PEMBUATAN DERMAGA TAMBATAN PERAHU	RT. 01 DESA KUALA KAHAR KECAMATAN SEBERANG KOTA, Kab. Tanjung Jabung Barat	Seberang Kota	Kuala Kahar	1 Kegiatan	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	Rekomendasi : diteruskan ke proses selanjutnya Koefisien : 1 Dok Anggaran : 0	Rekomendasi : dapat diteruskan Koefisien : 1 Dok Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : (Diterima) Perencanaan Dokumen Pembangunan Halte Sungai Akan Disesuaikan Dengan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2023 dan Diusulkan melalui APBD Provinsi Koefisien : 1 Dok Anggaran : 50000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
19	21-01-2022	H. MUH. SJAFRIL SIMAMORA, S.H.	PAN	Perhubungan	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	PEMBUATAN DERMAGA TAMBATAN PERAHU	RT. 07 PARIT KAMPUNG BARU DESA MEKAR ALAM KECAMATAN SEBERANG KOTA, Kab. Tanjung Jabung Barat	Seberang Kota	Mekar Alam	1 Kegiatan	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	Rekomendasi : diteruskan ke proses selanjutnya Koefisien : 1 Dok Anggaran : 0	Rekomendasi : dapat diteruskan Koefisien : 1 Dok Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : (Diterima) Perencanaan Dokumen Pembangunan Halte Sungai Akan Disesuaikan Dengan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2023 Koefisien : 1 Dok Anggaran : 50000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
20	21-01-2022	H. MUH. SJAFRIL SIMAMORA, S.H.	PAN	Perhubungan	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	PEMBUATAN DERMAGA TAMBATAN PERAHU	RT. 07 DESA MEKAR ALAM, Kab. Tanjung Jabung Barat	Seberang Kota	Mekar Alam	1 Kegiatan	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	Rekomendasi : diteruskan ke proses selanjutnya Koefisien : 1 Dok Anggaran : 0	Rekomendasi : dapat diteruskan Koefisien : 1 Dok Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : (Diterima) Perencanaan Dokumen Pembangunan Halte Sungai Akan Disesuaikan Dengan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2023 Koefisien : 1 Dok Anggaran : 50000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
21	21-01-2022	H. MUH. SJAFRIL SIMAMORA, S.H.	PAN	Perhubungan	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	PEMBUATAN HALTE/ DERMAGA TAMBATAN PERAHU RT. 01 DESA KUALA KAHAR	RT. 01 DESA KUALA KAHAR, Kab. Tanjung Jabung Barat	Seberang Kota	Kuala Kahar	1 Paket	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	Rekomendasi : diteruskan ke proses selanjutnya Koefisien : 1 Dok Anggaran : 0	Rekomendasi : dapat diteruskan Koefisien : 1 Dok Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : (Diterima) Perencanaan Dokumen Pembangunan Halte Sungai Akan Disesuaikan Dengan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2023 dan Diusulkan melalui APBD Provinsi Koefisien : 1 Dok Anggaran : 50000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
22	21-01-2022	H. MUH. SJAFRIL SIMAMORA, S.H.	PAN	Perhubungan	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	PEMBUATAN HALTE/DERMAGA TAMBATAN PERAHU	RT. 06 DUSUN PARIT PIDADA DESA TUNGKAL IV DESA, Kab. Tanjung Jabung Barat	Seberang Kota	Tungkal IV Desa	11 Unit	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	Rekomendasi : diteruskan ke proses selanjutnya Koefisien : 11 Dok Anggaran : 0	Rekomendasi : dapat diteruskan Koefisien : 11 Dok Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : (Diterima) Perencanaan Dokumen Pembangunan Halte Sungai Akan Disesuaikan Dengan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2023 Koefisien : 1 Dok Anggaran : 50000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
23	21-01-2022	ARPIN SIREGAR	PAN	Perhubungan	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	Pembuatan Jembatan/Dermaga	Parit Deli RT.12., Kab. Tanjung Jabung Barat	Kuala Betara	Betara Kiri	1 kegiatan	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	Rekomendasi : diteruskan ke proses selanjutnya Koefisien : 1 Dok Anggaran : 0	Rekomendasi : dapat diteruskan Koefisien : 1 Dok Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : (Diterima) Perencanaan Dokumen Pembangunan Halte Sungai Akan Disesuaikan Dengan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2023 Koefisien : 1 Dok Anggaran : 50000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
24	21-01-2022	H. MUH. SJAFRIL SIMAMORA, S.H.	PAN	Perhubungan	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	PEMBANGUNAN JERAMBAH/ DERMAGA	RT 07 DESA MEKAR ALAM KECAMATAN SEBERANG KOTA, Kab. Tanjung Jabung Barat	Seberang Kota	Mekar Alam	1 Kegiatan	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	Rekomendasi : diteruskan ke proses selanjutnya Koefisien : 1 Dok Anggaran : 0	Rekomendasi : dapat diteruskan Koefisien : 1 Dok Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : (Diterima) Perencanaan Dokumen Pembangunan Halte Sungai Akan Disesuaikan Dengan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2023 dan Diusulkan melalui APBD Provinsi Koefisien : 1 Dok Anggaran : 50000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
25	21-01-2022	JAMAL DARMAWAN SIE, SE. MM	TANJUNG JABUNG BARAT BERSATU	Perhubungan	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	Rehab Halte sungai Penyebrangan ke Kecamatan Sebrang Kota	RT 001, Kab. Tanjung Jabung Barat	Bram Itam	Tanjungsengulung	1 Kegiatan	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	Rekomendasi : diteruskan ke proses selanjutnya Koefisien : 1 Tiang Pancang Anggaran : 0	Rekomendasi : dapat diteruskan Koefisien : 1 Tiang Pancang Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : (Diterima) Usulan Rehab Halte Sungai di Desa Tanjung Senjulung di Prioritaskan Pada APBD Perubahan Tahun 2022 dan Akan Disesuaikan Dengan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2023 Koefisien : 2 Tiang Pancang Anggaran : 200000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
26	21-01-2022	H. MUH. SJAFRIL SIMAMORA, S.H.	PAN	Perhubungan	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	PEMBANGUNAN HALTE SUNGAI	DESA KUALA KAHAR KEC. SEBERANG KOTA, Kab. Tanjung Jabung Barat	Seberang Kota	Kuala Kahar	1 Kegiatan	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	Rekomendasi : diteruskan ke proses selanjutnya Koefisien : 1 Dok Anggaran : 0	Rekomendasi : dapat diteruskan Koefisien : 1 Dok Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : (Diterima) Perencanaan Dokumen Pembangunan Halte Sungai Akan Disesuaikan Dengan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2023 dan Diusulkan melalui APBD Provinsi Koefisien : 1 Dok Anggaran : 50000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

27	21-01-2022	H. ABDULLAH, SE	PDI P	Perhubungan	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	PEMBANGUNAN DERMAGA	DESA SUNGAI DUALAP KEC. KUALA BETARA, Kab. Tanjung Jabung Barat	Kuala Betara	Sungaidualap	1 Kegiatan	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	Rekomendasi : diteruskan ke proses selanjutnya Koefisien : 1 Dok Anggaran : 0	Rekomendasi : dapat diteruskan Koefisien : 1 Dok Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : (Diterima) Perencanaan Dokumen Pembangunan Halte Sungai Akan Disesuaikan Dengan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2023 Koefisien : 1 Dok Anggaran : 50000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
28	21-01-2022	JAMAL DARMAWAN SIE, SE. MM	TANJUNG JABUNG BARAT BERSATU	Perhubungan	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	Pembangunan Dermaga Tambat Perahu 2 x 50 M	Jl. Ahmad I, RT.17, Kab. Tanjung Jabung Barat	Tungkal Ilir	Tungkal Harapan	1 Kegiatan	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	Rekomendasi : diteruskan ke proses selanjutnya Koefisien : 1 Dok Anggaran : 0	Rekomendasi : dapat diteruskan Koefisien : 1 Dok Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : (Diterima) Perencanaan Dokumen Pembangunan Halte Sungai Akan Disesuaikan Dengan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2023 Koefisien : 1 Dok Anggaran : 50000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
29	09-02-2022	SYUFRAYOGI SYAIFUL, S.IP	GOLKAR	Perhubungan	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	belum adanya tempat naik	pembangunan halte sungai di desa kuala baru parit sapat, Kab. Tanjung Jabung Barat	Seberang Kota	Kuala Baru	1 paket	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	Rekomendasi : diteruskan ke Prosres Selanjutnya Koefisien : 1 Dok Anggaran : 0	Rekomendasi : Untuk ditindak lanjuti,sesuai aturan apakah diakomodir dalam renja opd Koefisien : 1 Dok Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Perencanaan Dokumen Pembangunan Halte Sungai Akan Disesuaikan Dengan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2023 Koefisien : 1 Dok Anggaran : 50000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
30	09-02-2022	SYUFRAYOGI SYAIFUL, S.IP	GOLKAR	Perhubungan	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	kurang panjang dermaga kegiatan airud polres tanjab barat	tungkal 1 jalan parit VII kantor airud polres tanjab barat, Kab. Tanjung Jabung Barat	Tungkal Ilir	Tungkal I	1 paket	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	Rekomendasi : diteruskan ke Prosres Selanjutnya Koefisien : 1 Unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Untuk ditindak lanjuti,sesuai aturan apakah diakomodir dalam renja opd Koefisien : 1 Unit Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Rehab Halte Sungai Akan Disesuaikan Dengan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2023 Koefisien : 1 Unit Anggaran : 100000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
31	14-02-2022	HASBI	TANJUNG JABUNG BARAT BERSATU	Perhubungan	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	Tiang pancang Dermaga Condong	Bantuan Tiang pancang dermaga Apung Lokasi Desa Tanjung Senjulang, Kab. Tanjung Jabung Barat	Bram Itam	Tanjungsenglulang	1 Paket	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	Rekomendasi : diteruskan ke proses selanjutnya Koefisien : 1 Paket Anggaran : 0	Rekomendasi : Untuk ditindak lanjuti,sesuai aturan apakah diakomodir dalam renja opd Koefisien : 1 Paket Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Rehab Halte Sungai Akan Disesuaikan Dengan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2023 Koefisien : 1 Paket Anggaran : 150000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
32	14-02-2022	HASBI	TANJUNG JABUNG BARAT BERSATU	Perhubungan	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	Dermaga rusak	Pembangunan dermaga Sungai Nibung Lokasi Lokasi Desa Sungai Nibung, Kab. Tanjung Jabung Barat	Tungkal Ilir	Sungainibung	1 Paket	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	Rekomendasi : diteruskan ke proses selanjutnya Koefisien : 1 Dok Anggaran : 0	Rekomendasi : Untuk ditindak lanjuti,sesuai aturan apakah diakomodir dalam renja opd Koefisien : 1 Dok Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Perencanaan Dokumen Pembangunan Halte Sungai Akan Disesuaikan Dengan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2023 Koefisien : 1 Dok Anggaran : 50000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

33	14-02-2022	DEDI HADI, SH	GOLKAR	Perhubungan	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	Pembangunan Dermaga	RT.05 Desa Betara Kanan Kecamatan Kuala Betara, Kab. Tanjung Jabung Barat	Kuala Betara	Betara Kanan	1 kegiatan	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	Rekomendasi : diteruskan ke proses selanjutnya Koefisien : 1 Dok Anggaran : 0	Rekomendasi : Untuk ditindak lanjuti,sesuai aturan apakah diakomodir dalam renja opd Koefisien : 1 Dok Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Perencanaan Dokumen Pembangunan Halte Sungai Akan Disesuaikan Dengan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2023 Koefisien : 1 Dok Anggaran : 50000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
34	14-02-2022	SYUFRAYOGI SYAIFUL, S.IP	GOLKAR	Perhubungan	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	Pembuatan Dermaga	Parit Selong, Muara Seberang. Kec. Seberang Kota, Kab. Tanjung Jabung Barat	Seberang Kota	Muaraseberang	1 kegiatan	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	Rekomendasi : diteruskan ke proses selanjutnya Koefisien : 1 Dok Anggaran : 0	Rekomendasi : Untuk ditindak lanjuti,sesuai aturan apakah diakomodir dalam renja opd Koefisien : 1 Dok Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Perencanaan Dokumen Pembangunan Halte Sungai Akan Disesuaikan Dengan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2023 Koefisien : 1 Dok Anggaran : 50000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
35	14-02-2022	H. MUH. SJAFRIL SIMAMORA, S.H.	PAN	Perhubungan	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	REHAB HALTE PENYEBERANGAN DAN TIANG PANCANG	DESA TANJUNG SENJULANG KEC. BRAM ITAM, Kab. Tanjung Jabung Barat	Bram Itam	Tanjungsengulang	6 TIANG	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	Rekomendasi : diteruskan ke proses selanjutnya Koefisien : 6 TIANG Anggaran : 0	Rekomendasi : Untuk ditindak lanjuti,sesuai aturan apakah diakomodir dalam renja opd Koefisien : 6 TIANG Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Rehab Halte Sungai Akan Di prioritaskan padan APBDP Tahun 2022 dan tetap Disesuaikan Dengan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2023 Koefisien : 6 TIANG Anggaran : 300000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
36	14-02-2022	H. MUH. SJAFRIL SIMAMORA, S.H.	PAN	Perhubungan	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	PEMBUATAN DERMAGA KAYU VOLUME 2 X 35 M	RT. 01 PARIT BAMIN DESA MEKAR ALAM KEC. SEBERANG KOTA, Kab. Tanjung Jabung Barat	Seberang Kota	Mekar Alam	1 kegiatan	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	Rekomendasi : diteruskan ke proses selanjutnya Koefisien : 1 unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Untuk ditindak lanjuti,sesuai aturan apakah diakomodir dalam renja opd Koefisien : 1 unit Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Rehab Halte Sungai Akan Diprioritaskan pada APBDP Tahun 2022 dan tetap Disesuaikan Dengan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2023 Koefisien : 1 unit Anggaran : 200000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
37	14-02-2022	H. MUH. SJAFRIL SIMAMORA, S.H.	PAN	Perhubungan	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	REHAB DERMAGA KAYU VOLUME 2 X 35 M	RT. 01 PARIT BAMIN DESA MEKAR ALAM, Kab. Tanjung Jabung Barat	Seberang Kota	Mekar Alam	1 kegiatan	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	Rekomendasi : diteruskan ke proses selanjutnya Koefisien : 1 unit Anggaran : 0	Rekomendasi : Untuk ditindak lanjuti,sesuai aturan apakah diakomodir dalam renja opd Koefisien : 1 unit Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Rehab Halte Sungai Akan Diprioritaskan Pada Anggara Perubahan 2022 dan Tetap Disesuaikan Dengan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2023 Koefisien : 3 unit Anggaran : 200000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

38	14-02-2022	H. MUH. SJAFRIL SIMAMORA, S.H.	PAN	Perhubungan	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	PEMBUATAN DERMAGA KAYU VOLUME 2 X 35 M	RT. 07 PARIT KAMPUNG BARU DESA MEKAR ALAM KEC. SEBERANG KOTA, Kab. Tanjung Jabung Barat	Seberang Kota	Mekar Alam	1 kegiatan	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	Rekomendasi : diteruskan ke proses selanjutnya Koefisien : 1 Dok Anggaran : 0	Rekomendasi : Untuk ditindak lanjuti,sesuai aturan apakah diakomodir dalam renja opd Koefisien : 1 Dok Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Perencanaan Dokumen Pembangunan Halte Sungai Akan Disesuaikan Dengan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2023 Koefisien : 1 Dok Anggaran : 50000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
39	14-02-2022	H. MUH. SJAFRIL SIMAMORA, S.H.	PAN	Perhubungan	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	PEMBUATAN DERMAGA KAYU VOLUME 2 X 35 M	RT. 06 PARIT BATU PAHAT DESA MEKAR ALAM KEC. SEBERANG KOTA, Kab. Tanjung Jabung Barat	Seberang Kota	Mekar Alam	1 kegiatan	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	Rekomendasi : diteruskan ke proses selanjutnya Koefisien : 1 Dok Anggaran : 0	Rekomendasi : Untuk ditindak lanjuti,sesuai aturan apakah diakomodir dalam renja opd Koefisien : 1 Dok Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Perencanaan Dokumen Pembangunan Halte Sungai Akan Disesuaikan Dengan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2023 Koefisien : 1 Dok Anggaran : 50000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
40	14-02-2022	H. MUH. SJAFRIL SIMAMORA, S.H.	PAN	Perhubungan	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	PEMBUATAN HALTE SUNGAI VOLUME 2 X 45 M	RT. 01 DESA KUALA KAHAR KEC. SEBERANG KOTA, Kab. Tanjung Jabung Barat	Seberang Kota	Kuala Kahar	1 kegiatan	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	Rekomendasi : diteruskan ke proses selanjutnya Koefisien : 1 Dok Anggaran : 0	Rekomendasi : Untuk ditindak lanjuti,sesuai aturan apakah diakomodir dalam renja opd Koefisien : 1 Dok Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Perencanaan Dokumen Pembangunan Halte Sungai Akan Disesuaikan Dengan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2023 Koefisien : 1 Dok Anggaran : 50000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
41	14-02-2022	H. MUH. SJAFRIL SIMAMORA, S.H.	PAN	Perhubungan	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	PEMBUATAN HALTE SUNGAI	RT. 06 DUSUN PARIT PIDADA KEC. SEBERANG KOTA, Kab. Tanjung Jabung Barat	Seberang Kota	Tungkal IV Desa	1 kegiatan	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	Rekomendasi : diteruskan ke proses selanjutnya Koefisien : 1 Dok Anggaran : 0	Rekomendasi : Untuk ditindak lanjuti,sesuai aturan apakah diakomodir dalam renja opd Koefisien : 1 Dok Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Perencanaan Dokumen Pembangunan Halte Sungai Akan Disesuaikan Dengan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2023 Koefisien : 1 Dok Anggaran : 50000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
42	15-02-2022	H. MUH. SJAFRIL SIMAMORA, S.H.	PAN	Perhubungan	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	PERMOHONAN PEMBANGUNAN DERMAGA HALTE SUNGAI	PASAR IJAB RAYA RT. 01 DESA TELUK PULAI RAYA KEC. SEBERANG KOTA, Kab. Tanjung Jabung Barat	Seberang Kota	Telukpulai Raya	1 kegiatan	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	Rekomendasi : diteruskan ke proses selanjutnya Koefisien : 1 Dok Anggaran : 0	Rekomendasi : Untuk ditindak lanjuti,sesuai aturan apakah diakomodir dalam renja opd Koefisien : 1 Dok Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	Rekomendasi : Perencanaan Dokumen Pembangunan Halte Sungai Akan Disesuaikan Dengan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2023 Koefisien : 1 Dok Anggaran : 50000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

Daftar Usulan Musrenbang Yang Masuk Kedalam Urusan Perhubungan Tahun 2022

No	Tgl Usul	Pengusul	Profil	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Kategori Usulan	Koefisien	Rekomendasi Kelurahan/Desa	Rekomendasi Kecamatan	Rekomendasi SKPD	Rekomendasi Bappeda	Status	
1	05-01-2022	Kelurahan Teluk nilau	Lurah Teluknilau	Perhubungan	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai	5. Pembangunan Halte Sungai RT 01 (Cadangan)	RT 01, Kab. Tanjung Jabung Barat	Pengabuan	Teluknilau	Kabupaten /Kota	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	Rekomendasi : teruskan Koefisien : 0 Dok Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0		Rekomendasi : diteruskan ke OPD, merupakan akses alternatif masyarakat Koefisien : 0 Dok Anggaran : 0	Rekomendasi : (Diterima) Penyusunan Dokumen Perencanaan Akan Disesuaikan dalam rencana kerja Dinas Perhubungan Tahun anggaran 2023 Koefisien : 1 Dok Anggaran : 500000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota	
2	05-01-2022	Muhammad Arhani	Kepala Desa Sungaljeri ng	Perhubungan	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai	Halte Sungai Desa Sungai Jering (PRIORITAS)	RT 05 Dsn Tanjung Baru Desa Sungai Jering, Kab. Tanjung Jabung Barat	Pengabuan	Sungajerin g	Kabupaten /Kota	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	Rekomendasi : dapat dilanjutkan Koefisien : 0 Unit Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0		Rekomendasi : diteruskan ke OPD, merupakan akses utama pelabuhan di Desa Sungai Jering Koefisien : 0 Unit Anggaran : 0	Rekomendasi : (Diterima) Dokumen Perencanaan Sudah ada Sekanjutnya Akan Diusulkan untuk pembangunan fisik ke Kementerian Perhubungan RI Tahun Anggaran 2023 Koefisien : 1 Unit Anggaran : 2500000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota	
3	05-01-2022	Muhamin	Kepala Desa Pasar Senin	Perhubungan	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai	1.Pembangunan Dermaga Bongkar Muat Barat RT.08 Dusun Utama, Desa Pasar Senin Volume 40 x 5 M	RT.08 Dusun Utama , Desa Pasar Senin, Kecamatan Pengabuan, Kab. Tanjung Jabung Barat	Pengabuan	Pasar Senin	Kabupaten /Kota	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	Rekomendasi : dapat dilanjutkan Koefisien : 0 Dok Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0		Rekomendasi : diteruskan ke OPD, merupakan akses bongkar muat pedagang Koefisien : 0 Dok Anggaran : 0	Rekomendasi : (Diterima) Penyusunan Dokumen Perencanaan Akan Disesuaikan dalam rencana kerja Dinas Perhubungan Tahun anggaran 2023 Koefisien : 1 Dok Anggaran : 500000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota	
4	08-01-2022	Choiri	Kepala Desa Sungalram bai	Perhubungan	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai	Dermaga yang selama ini dibangun dengan swakelola oleh masyarakat sebagai sarana penyebrangan orang dan kendaraan kurang memenuhi standar ke aman	RT 04 Desa Sungai rambai Panjang 3 x 40 M, Kab. Tanjung Jabung Barat	Senyerang	Sungairam bai	Kabupaten /Kota	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	Rekomendasi : dapat dilanjutkan Koefisien : 0 Dok Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER			Rekomendasi : Keberadaan fasilitas ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai sarana penyebrangan orang dan kendaraan yang saat ini kondisinya kurang memenuhi standar ke aman Koefisien : 0 Dok Anggaran : 0	Rekomendasi : (Diterima) Penyusunan Dokumen Perencanaan Akan Disesuaikan dalam rencana kerja Dinas Perhubungan Tahun anggaran 2023 dan akan diusulkan juga melalui APBD Provinsi Jambi Koefisien : 1 Dok Anggaran : 500000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota	
5	09-01-2022	Tumirin	Kepala Desa Margo Rukun	Perhubungan	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai	Peroritas 2 Rehab pancang Dermaga 6 Tiang Pancang	RT. 04 Margo Rukun, Kab. Tanjung Jabung Barat	Senyerang	Margo Rukun	Kabupaten /Kota	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	Rekomendasi : tidak disertakan dokumen pendukung Koefisien : 0 Unit Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER			Rekomendasi : Keberadaan fasilitas ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai sarana penyebrangan orang dan kendaraan yang saat ini kondisinya kurang memenuhi standar ke aman Koefisien : 0 Unit Anggaran : 0	Rekomendasi : (Diterima) Usulan Rehab 2 Unit Tiang pancang Halte Sungai di RT.04 Desa Margo Rukun Akan Diajukan pada APBD Perubahan Tahun 2022 Koefisien : 2 Unit Anggaran : 200000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota	
6	09-01-2022	Taslim, S.A.P	Kepala Desa Sungailandak	Perhubungan	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai	Prioritas II Pembangunan/Perencanaan Halte Sungai 2,5 x 30 m (1 Paket)	Parit 8 RT. 04, Kab. Tanjung Jabung Barat	Senyerang	Sungailandak	Kabupaten /Kota	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	Rekomendasi : tidak disertakan dokumen pendukung Koefisien : 0 Dok Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER			Rekomendasi : Keberadaan fasilitas ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai sarana penyebrangan orang dan kendaraan yang saat ini kondisinya kurang memenuhi standar ke aman Koefisien : 0 Dok Anggaran : 0	Rekomendasi : (Diterima) Penyusunan Dokumen Perencanaan Akan Disesuaikan dalam rencana kerja Dinas Perhubungan Tahun anggaran 2023 dan akan diusulkan juga melalui APBD Provinsi Jambi Koefisien : 1 Dok Anggaran : 500000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota	
7	10-01-2022	H. Mardani	Kepala Desa Tanjungsenjulang	Perhubungan	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai	Rehab Halte sungai Penyebrangan ke Kecamatan Sebrang Kota (Prioritas Usulan)	RT 001 Desa Tanjung Senjulang, Kab. Tanjung Jabung Barat	Bram Itam	Tanjungsenjulang	Kabupaten /Kota	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	Rekomendasi : dapat dilanjutkan Koefisien : 0 Unit Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0		Rekomendasi : 1. Diteruskan ke OPD. 2. Sangat dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan masyarakat sehari-hari. 3. Sebagai sarana dan prasarana pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Koefisien : 0 unit Anggaran : 0	Rekomendasi : (Diterima) Usulan Rehab Halte Sungai di Desa Tanjung Senjulang Kecamatan Bram Itam akan di prioritaskan pada APBD Perubahan Tahun 2022 Koefisien : 2 unit Anggaran : 200000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota	
8	10-01-2022	Sunari, S.Pd	Kepala Desa Kuala Kahar	Perhubungan	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai	1. Pembangunan Dermaga Apung/ Halte Sungai 2 x 45 M (Prioritas)	Kuala Kahar RT. 001 Desa Kuala Kahar, Kab. Tanjung Jabung Barat	Seberang Kota	Kuala Kahar	Kabupaten /Kota	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	Rekomendasi : dapat dilanjutkan Koefisien : 0 Dok Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0		Rekomendasi : Usulan dapat dilanjutkan ketahap selanjutnya berdasarkan hasil kesepakatan Musrenbang kecamatan serta menjadi Usulan Prioritas Koefisien : 0 Dok Anggaran : 0	Rekomendasi : (Diterima) Penyusunan Dokumen Perencanaan Akan Disesuaikan dalam rencana kerja Dinas Perhubungan Tahun anggaran 2023 dan akan diusulkan juga melalui APBD Provinsi Jambi Koefisien : 1 Dok Anggaran : 500000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota	
9	10-01-2022	A. Wahab	Kepala Desa Tungkal IV Desa	Perhubungan	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai	Pembangunan Dermaga tambatan perahu/halte sungai (Prioritas) 2 x 55 m	RT 06 Dusun Pidada, Kab. Tanjung Jabung Barat	Seberang Kota	Tungkal IV Desa	Kabupaten /Kota	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	Rekomendasi : dapat dilanjutkan Koefisien : 0 Dok Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0		Rekomendasi : Usulan dapat dilanjutkan ketahap selanjutnya berdasarkan hasil kesepakatan Musrenbang kecamatan serta menjadi Usulan Prioritas Koefisien : 0 Dok Anggaran : 0	Rekomendasi : (Diterima) Penyusunan Dokumen Perencanaan Akan Disesuaikan dalam rencana kerja Dinas Perhubungan Tahun anggaran 2023 Koefisien : 1 Dok Anggaran : 500000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota	
10	13-01-2022	Kelurahan Senyerang	Lurah Senyerang	Perhubungan	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai	Pembangunan Halte Sungai Kelurahan Senyerang	RT. 05, Kab. Tanjung Jabung Barat	Senyerang	Senyerang	Kabupaten /Kota	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	Rekomendasi : dapat dilanjutkan Koefisien : 0 Dok Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER	0		Rekomendasi : Keberadaan Pembangunan Halte Sungai ini tentu sebagai penghubung desa ke kecamatan/kabupaten Koefisien : 0 Dok Anggaran : 0	Rekomendasi : (Diterima) Penyusunan Dokumen Perencanaan Akan Disesuaikan dalam rencana kerja Dinas Perhubungan Tahun anggaran 2023 Koefisien : 1 Dok Anggaran : 500000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota	
11	14-01-2022	Taufiq Rahman, SE.Sy	Kepala Desa Sungalkep ayang	Perhubungan	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai	Dermaga Parit 4 x 10 m	parit 4 Desa Sungai Kepayang, Kab. Tanjung Jabung Barat	Senyerang	Sungalkep ayang	Kabupaten /Kota	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	Rekomendasi : tidak disertakan dokumen pendukung Koefisien : 0 Unit Anggaran : 0	NON BELANJA TRANSFER			Rekomendasi : Keberadaan fasilitas ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai sarana penyebrangan orang dan kendaraan yang saat ini kondisinya kurang memenuhi standar ke aman Koefisien : 0 Unit Anggaran : 0	Rekomendasi : (Diterima) - Perubahan lokasi Usulan - Rehab Berat Pemeliharaan halte sungai diprioritaskan pada APBD Dinas Perhubungan Tahun 2023 di RT.01 Parit Pasirah Desa Sungai Kepayang, Kab. Tanjung Jabung Barat, Kec. Senyerang, Desa Sungai kepayang Koefisien : 1 Unit Anggaran : 200000000		Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota	

**BAB III****TUJUAN DAN SASARAN
PERANGKAT DAERAH****3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional****a. Arah Kebijakan Nasional Bidang Perhubungan**

Arah kebijakan umum Nasional bidang transportasi darat adalah pengembangan jaringan transportasi jalan primer diarahkan untuk ditingkatkan kemampuan dan daya dukungnya sesuai dengan beban lalu lintas terutama yang melayani dan menghubungkan pusat kegiatan nasional, kegiatan wilayah serta kawasan andalan yang cepat berkembang.

Sedangkan arah kebijakan umum Nasional bidang transportasi perkotaan ditujukan untuk menciptakan keseimbangan antara sistem angkutan umum dan pergerakan kendaraan pribadi. Pengembangan sistem angkutan umum dan pergerakan angkutan pribadi dikembangkan secara terencana, terpadu antar berbagai jenis moda transportasi sesuai dengan besaran kota, fungsi kota, dan hirarkhi fungsional kota dengan mempertimbangkan karakteristik dan keunggulan karakteristik moda, perkembangan teknologi, pemakaian energi, lingkungan dan tata ruang.

b. Prioritas Pembangunan Nasional Bidang Perhubungan

Program prioritas pembangunan perhubungan darat, yaitu program pembinaan, pengembangan dan pembangunan transportasi perkotaan dengan terciptanya rencana induk angkutan perkotaan, rencana induk system informasi lalu lintas

perkotaan, penyelenggaraan manajemen dan rekayasa di jalan nasional pada kawasan perkotaan dan angkutan umum perkotaan.

c. VISI DAN MISI RPJMD

Visi RPJMD	"MUNUJU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH" <i>(Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)</i>
Misi RPJMD :	
Misi 1	: 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berahlak
Misi 2	: 2. Cipta kondisi sosial yang tentram, tertib, dan harmonis
Misi 3	: 3. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik
Misi 4	: 4. Peningkatan aktivitas perekonomian daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan
Misi 5	: 5. Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota

Dinas perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengacu pada Misi 5 RPJMD yaitu Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota. Dengan tujuan 5.1 yaitu Mengurangi kesenjangan pembangunan desa dan kota, dan sasaran 5.1.2 yaitu Menguatnya konektivitas dari desa sampai kota dan daerah perbatasan.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sasaran juga dapat diartikan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD. Adapun tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah (TABEL 3.2)

Tabel 3.2
Tujuan Sasaran Indikator dan Target Tahun 2021-2026
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2021	Target Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1. Terwujudnya Konektivitas dan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	1.1. Meningkatnya Konektivitas dan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.	1.1.1. Indeks Konektivitas Jaringan Jalan	40%	45%	50%	55%	60%	65%	65%
		1.1.2. Indeks Konektivitas Pedesaan	50%	55%	60%	65%	70%	75%	75%
		1.1.3. Persentase Menurunnya Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Darat	1154 Unit (85,4%)	1.170 Unit (86,6%)	1.188 Unit (88%)	1.210 Unit (89,6%)	1.300 Unit (96,2%)	1.350 Unit (98%)	1.350 Unit (98%)
		1.1.4. Persentase Prasarana Lalu lintas angkutan jalan, angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang tersedia berbanding dengan kebutuhan	60%	65%	70%	75%	80%	85%	85%
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	2.1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja, dan Keuangan	2.1.1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).	70	70	78	80	80	85	85 (A)
		2.1.2. Nilai AKIP	CC	CC	B	B	BB	BB	BB
		2.1.3. Menurunnya Jumlah Temuan Administrasi dan Keuangan	0 Temuan	0	0	0	0	0	0 Temuan

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah dirumuskan, disusun sejumlah rencana program dan kegiatan disertai dengan rumusan indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif program.

Program dan kegiatan yang perlu direncanakan dalam sisa periode Renstra 2022-2025 agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan mampu dicapai. Terdapat 9 program yang dilaksanakan dalam kurun waktu periode Renstra Perubahan 2022 -2025 adalah sebagai berikut:

A. Program, Kegiatan dan Subkegiatan

a. Faktor – Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan.

1. Sebagai Relevansi Visi dan Misi Kepala Daerah
2. Peningkatan Potensi Ekonomi Daerah
3. Meningkatkan aksesibilitas untuk masyarakat daerah dari desa sampai ke kota.

b. Uraian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- c. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- g. Penyediaan Bahan/Material
- h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Pengadaan Mebel
- d. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- e. Pengadaan Aset Tetap Lainnya
- f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

c. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

1. Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
- b. Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

2. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
- b. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan

3. Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**Sub Kegiatan :**

- a. Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C
- b. Pembangunan Gedung Terminal
- c. Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
- d. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
- e. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C

4. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**Sub Kegiatan :**

- a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

5. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**Sub Kegiatan :**

- a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

- c. Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor
- d. Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- e. Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- f. Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji
- g. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian erkala Kendaraan Bermotor

6. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa LaluLintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
- b. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
- c. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota

7. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin
- b. Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin
- c. Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
- d. Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin

8. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**Sub Kegiatan :**

- a. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota

9. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**Sub Kegiatan :**

- a. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- b. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

10. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**Sub Kegiatan :**

- a. Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota
- b. Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan

11. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

12. Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah

Kabupaten/Kota**Sub Kegiatan :**

- a. Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha

Sub Kegiatan :

- a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

2. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota

3. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota

- b. Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota

4. Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- b. Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- c. Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota

5. Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal

Sub Kegiatan:

- a. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal
- b. Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal
- c. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal

6. Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau

Sub Kegiatan :

- a. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau
- b. Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau
- c. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau

7. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal

Sub Kegiatan :

- a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
- b. Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
- c. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal
- d. Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal

8. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**Sub Kegiatan :**

- a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
- b. Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau
- c. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau
- d. Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau

9. Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal**Sub Kegiatan :**

- a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal

10. Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal

Sub Kegiatan :

- a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal

11. Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal

Sub Kegiatan :

- a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal

12. Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal

Sub Kegiatan :

- a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal

Rekapitulasi jumlah program yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Program Rutin terdiri dari, 5 program dengan total kegiatan 20 kegiatan.
- b. Program Wajib terdiri dari, 5 program dengan total kegiatan 14 kegiatan.

Dapat di totalkan keseluruhan Setiap OPD terdiri dari program rutin dan program wajib adalah 10 program, terdiri 34 kegiatan

B. INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan berdasarkan kegiatan dalam setiap programnya.

C. KELOMPOK SASARAN

Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program dan kegiatan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

1. Masyarakat pengguna jalan dan pengguna kendaraan bermotor ;
2. Pemilik kendaraan umum angkutan orang dan kendaraan barang ;
3. Pemilik angkutan orang dan/atau barang di perairan;
4. Semua pihak yang berkepentingan pada urusan perhubungan.

3.3 Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023

Rencana target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 yang dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana Tabel di bawah :

Tabel 3.2**Prediksi Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023**

No	Uraian	Target (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp. 155.000.000,00
2	Retribusi Terminal	Rp. 90.000.000,00
3	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	Rp. 200.000.000,00
	Jumlah	Rp. 445.000.000,00

Tabel 3.1 (table T-C.33) Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif (Terlampir)

Tabel T.C.33
Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 Perkiraan Maju Tahun 2024
Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)//dan Kegiatan (output)	Satuan	Rencana Kerja Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2024	
						Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	2.1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana	%	Dishub	100%	Rp 8.790.536.945	APBD		100%	Rp 7.917.765.434,70
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia	%	Dishub	16	Rp 76.500.000	APBD		16	Rp 71.000.000,00
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dishub	4	Rp 12.000.000	APBD		4	Rp 12.000.000,00
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Dishub	1	Rp 5.000.000	APBD		1	Rp 5.000.000,00

			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	Dishub	1	Rp	5.000.000	APBD		1	Rp	5.000.000,00
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	Dishub	1	Rp	4.500.000	APBD		1	Rp	-
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	Dishub	1	Rp	5.000.000	APBD		1	Rp	4.000.000,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Dishub	3	Rp	20.000.000	APBD		3	Rp	20.000.000,00

		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Dishub	5	Rp 25.000.000	APBD		5	Rp 25.000.000,00
		Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan OPD	Laporan	Dishub	100%	Rp 5.185.000.000	APBD		100%	Rp 5.185.000.000,00
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang/Bulan yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan/O rang	Dishub	12/30	Rp 5.000.000.000	APBD		12/30	Rp 5.000.000.000
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokume n	Dishub	2	Rp 180.000.000	APBD		2	Rp 180.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Dishub	1	Rp 5.000.000	APBD		1	Rp 5.000.000
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Kartu Inventaris	%	Dishub	100%	Rp 210.000.000	APBD		100%	Rp 110.000.000,00
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokume n	Dishub	1	Rp 5.000.000	APBD		1	Rp 5.000.000
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokume n	Dishub	8	Rp 200.000.000	APBD		8	Rp 100.000.000

			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Dishub	1	Rp 5.000.000	APBD		1	Rp 5.000.000
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Orang	Dishub	134	Rp 255.000.000	APBD		133	Rp 225.000.000,00
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Dishub	132	Rp 195.000.000	APBD		132	Rp 195.000.000
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Dishub	2	Rp 60.000.000	APBD		1	Rp 30.000.000,00
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	Dishub	100%	Rp 582.044.110	APBD		100%	Rp 601.590.433,80
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Dishub	210	Rp 5.444.110	APBD		210	Rp 4.990.434
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Perlengkapan Kantor	Paket	Dishub	16	Rp 70.000.000	APBD		6	Rp 75.000.000

			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Dishub	12	Rp 25.000.000	APBD		12	Rp 25.000.000
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Dishub	800	Rp 25.000.000	APBD		800	Rp 25.000.000
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Dishub	12	Rp 90.000.000	APBD		12	Rp 95.000.000
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dishub	12	Rp 6.600.000	APBD		12	Rp 6.600.000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Dishub	12	Rp 360.000.000	APBD		12	Rp 370.000.000
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah OPD yang tersedia	Unit	Dishub	26	Rp 1.225.000.000	APBD		28	Rp 445.000.000,00

			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	Dishub	0	Rp -	APBD		1	Rp 50.000.000
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Dishub	2	Rp 950.000.000	APBD		3	Rp 120.000.000,00
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	Dishub	10	Rp 50.000.000	APBD		10	Rp 50.000.000
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Dishub	1	Rp 50.000.000	APBD		1	Rp 50.000.000
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Dishub	10	Rp 100.000.000	APBD		10	Rp 100.000.000
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Dishub	3	Rp 75.000.000	APBD		3	Rp 75.000.000

			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jas Penunjang Urusan Yang Tersedia	Bulan	Dishub	12	Rp 140.320.596	APBD		12	Rp 160.208.780,90
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Dishub	12	Rp 1.428.000	APBD		12	Rp 1.316.185
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Dishub	1	Rp 120.000.000	APBD		1	Rp 140.000.000
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Dishub	1	Rp 18.892.596	APBD		1	Rp 18.892.596
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bangunan/kendara an Kantor Kondisi Baik	Unit	Dishub	95	Rp 1.116.672.240	APBD		95	Rp 1.119.966.220
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Dishub	2	Rp 200.000.000	APBD		2	Rp 200.000.000

			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Dishub	32	Rp 531.300.000	APBD		32	Rp 531.300.000
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	Dishub	54	Rp 30.372.240	APBD		54	Rp 28.666.220
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Dishub	7	Rp 355.000.000	APBD		7	Rp 360.000.000
1. Terwujudnya Konektivitas dan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	1.1 Menguatnya Konektivitas dan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan		PROGRAM PENYELENGGAR AAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN	Tingkat Tertib Lalu Lintas Angkutan Jalan	%	Dishub	100%	Rp 3.105.000.000	APBD		100%	Rp 2.160.000.000
			Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota yang tersedia	Dokumen	Dishub	1	Rp 500.000.000	APBD		2	Rp 50.000.000
			Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	Dishub	1	Rp 500.000.000	APBD		0	Rp -
			Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	Dishub	0	Rp -	APBD		2	Rp 50.000.000

			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Yang Tersedia	Unit	Dishub	55	Rp 185.000.000	APBD		80	Rp 250.000.000
			Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit	Dishub	35	Rp 150.000.000	APBD		50	Rp 200.000.000
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	Dishub	20	Rp 35.000.000	APBD		30	Rp 50.000.000
			Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	%	Dishub	100%	Rp 50.000.000	APBD		100%	Rp 115.000.000
			Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	Dokumen	Dishub	1	Rp 50.000.000	APBD		1	Rp 75.000.000
			Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	Dishub	0	Rp -	APBD		4	Rp 40.000.000
			Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Yang Tersedia	Dokumen	Dishub	1	Rp 10.000.000	APBD		1	Rp 10.000.000

			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	Dishub	1	Rp 10.000.000	APBD		1	Rp 10.000.000
			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	Dishub	100%	Rp 1.045.000.000	APBD		100%	Rp 250.000.000
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit	Dishub	1	Rp 750.000.000	APBD		0	Rp -
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah aparatur yang mengikuti diklJumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnyaat struktural	Orang	Dishub	2	Rp 40.000.000	APBD		2	Rp 40.000.000
			Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Unit	Dishub	1000	Rp 35.000.000	APBD		1000	Rp 40.000.000

			Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokuem en	Dishub	1000	Rp	75.000.000	APBD		1000	Rp	50.000.000
			Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	Dishub	2	Rp	20.000.000	APBD		2	Rp	20.000.000
			Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Laporan	Dishub	1	Rp	25.000.000	APBD		0	Rp	-
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	Dishub	8	Rp	100.000.000	APBD		8	Rp	100.000.000
1.2. Meningkatny a Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor Transportasi Darat, Sungai dan Perairan			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan	%	Dishub	100%	Rp	1.050.000.000	APBD		100%	Rp	1.070.000.000
			Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	Dishub	1	Rp	60.000.000	APBD		1	Rp	70.000.000

			Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	Dishub	36	Rp 960.000.000	APBD		36	Rp 970.000.000
			Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	Dishub	3	Rp 30.000.000	APBD		3	Rp 30.000.000
			Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota		%	Dishub	100%	Rp 15.000.000	APBD		100%	Rp 15.000.000
			Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	Dokumen	Dishub	0	Rp -	APBD		0	Rp -
			Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	Dishub	1	Rp 15.000.000	APBD		1	Rp 15.000.000
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan	Dishub	0	Rp -	APBD		0	Rp -
			Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	Laporan	Dishub	0	Rp -	APBD		0	Rp -
			Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Terlaksananya Razia/operasi	Razia/operasi gabungan	Dishub	2	Rp 50.000.000	APBD		2	Rp 50.000.000

			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Laporan	Dishub	2	Rp 50.000.000	APBD		2	Rp 75.000.000
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	Dishub	100%	Rp 175.000.000	APBD		100%	Rp 175.000.000
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	Dishub	0	Rp -	APBD		0	Rp -

			Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	Dishub	5	Rp	175.000.000	APBD		5	Rp	175.000.000
			Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	Dishub	100%	Rp	-	APBD		100%	Rp	150.000.000
			Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	Dishub	0	Rp	-	APBD		1	Rp	150.000.000
			Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	Dishub	0	Rp	-	APBD		0	Rp	-

			Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	Dishub	100%	Rp 15.000.000	APBD		100%	Rp 15.000.000
			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Laporan		1	Rp 15.000.000	APBD		1	Rp 15.000.000
			Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	Dokumen	Dishub	1	Rp 10.000.000	APBD		1	Rp 10.000.000

			Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dishub	1	Rp 10.000.000	APBD		1	Rp 10.000.000
1. Menguatnya Konektivitas dan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	1.1 Menguatnya Konektivitas dan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Tingkat Pemenuhan Pengelolaan Pelayaran	%	Dishub	100%	Rp 8.852.500.000	APBD		100%	Rp 7.590.000.000
			Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Persentase Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	%	Dishub	100%	Rp 15.000.000	APBD		100%	Rp 15.000.000
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	Dishub	1	Rp 15.000.000	APBD		1	Rp 15.000.000

			Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	%	Dishub	100%	Rp 15.000.000	APBD		100%	Rp 15.000.000
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	Dishub	1	Rp 15.000.000	APBD		1	Rp 15.000.000
			Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	%	Dishub	100%	Rp 1.100.000.000	APBD		100%	Rp 1.100.000.000

			Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dishub	1	Rp 10.000.000	APBD		1	Rp 10.000.000
			Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	Dishub	12	Rp 1.090.000.000	APBD		12	Rp 1.090.000.000

			Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	%	Dishub	100%	Rp 22.500.000	APBD		100%	Rp 10.000.000
			Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dishub	1	Rp 12.500.000	APBD		0	Rp -
			Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	Dishub	3	Rp 10.000.000	APBD		3	Rp 10.000.000

			Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	%	Dishub	100%	Rp 300.000.000	APBD		100%	Rp 1.500.000.000
			Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal\	Dokumen	Dishub	1	Rp 300.000.000	APBD		1	Rp 1.500.000.000
			Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	%	Dishub	100%	Rp 535.000.000	APBD		100%	Rp 535.000.000

			Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	Dokumen	Dishub	10	Rp 500.000.000	APBD		10	Rp 500.000.000
			Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	Dokumen	Dishub	2	Rp 25.000.000	APBD		2	Rp 25.000.000

			Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Laporan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	Laporan	Dishub	1	Rp 10.000.000	APBD		1	Rp 10.000.000
			Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	%	Dishub	100%	Rp 6.805.000.000	APBD		100%	Rp 4.355.000.000
			Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	Unit	Dishub	1	Rp 2.500.000.000	APBD		1	Rp 2.500.000.000
			Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit	Dishub	4	Rp 800.000.000	APBD		4	Rp 850.000.000
			Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Lapora	Dishub	1	Rp 10.000.000	APBD		1	Rp 10.000.000
			Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan	Unit	Dishub	2	Rp 2.500.000.000	APBD		0	Rp -

			Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara	Unit	Dishub	3	Rp 995.000.000	APBD		3	Rp 995.000.000
			Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal	%	Dishub	1	Rp 15.000.000	APBD		1	Rp 15.000.000
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dilaksanakan	Laporan	Dishub	1	Rp 15.000.000	APBD		1	Rp 15.000.000
			Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	%	Dishub	1	Rp 15.000.000	APBD		1	Rp 15.000.000
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Laporan	Dishub	1	Rp 15.000.000	APBD		1	Rp 15.000.000

			Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	%	Dishub	1	Rp 15.000.000	APBD		1	Rp 15.000.000
			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	Dishub	0	Rp -	APBD		0	Rp -
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dilakukan	Laporan	Dishub	1	Rp 15.000.000	APBD		1	Rp 15.000.000

			Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	%	Dishub	1	Rp 15.000.000	APBD		1	Rp 15.000.000
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Laporan	Dishub	1	Rp 15.000.000	APBD		1	Rp 15.000.000
JUMLAH TOTAL PERTAHUN								Rp 20.748.036.945				Rp 17.667.765.435

Kuala Tungkal, Februari 2021

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

DINAS PERHUBUNGAN
SYAMSUL JUHARI S. Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 197012311992031 001



BAB IV

KESIMPULAN

4.1. KESIMPULAN

Rencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru.

Output Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Program Tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

RENJA Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung jabung Barat selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Perhubungan Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa yang akan datang.

4.2. KAIDAH – KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan

pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Bappeda Kabupaten Lamongan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
 - a. Melaksanakan Renja Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaa Anggaran.
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2023.

4.3. RENCANA TINDAK LANJUT

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2023, selanjutnya Renja Tahun 2023 akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah

Kuala Tungkal, November 2022

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANJUNGPABARAT**



SYAMSUL JUHARI, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19701223 199203 1 001